

No. 213 November 2023

BaKTI News

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**MENGENAL FORUM
DISABILITAS MAROS**

**TOXIC RELATIONSHIP PADA REMAJA:
KETIKA HUBUNGAN RENTAN
AKAN EKSPLOITASI SEKSUAL**

**PENGENDALIAN NYAMUK *ANOPHELES*
PENULAR MALARIA
DI NUSA TENGGARA TIMUR**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI**News**

November 2023

No. **213**

- 1** Mengetahui Forum Disabilitas Maros
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 5** Jurnalisme Inklusif
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 9** Toxic Relationship pada Remaja:
Ketika Hubungan Rentan akan
Eksplotasi Seksual
Oleh **CHANTIKA MAHARANI**
- 13** Garuda Energi Nusantara Melebarkan
Sayap Hingga ke Desa
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 16** Perempuan Papua Saling Dukung
Kesehatan Menstruasi
Bagian II- Selesai
Oleh **NARRISWARI**
- 21** Upaya Para Pemuda Batu Lanteh Jaga
Kantong Air Sumbawa Tetap Lestari
Oleh **FATHUL RAKHMAN**
- 25** Cara Indonesia Memerangi
Pencemaran Sampah Plastik di Laut
dari Sumbernya di Darat
Oleh **TIM PENULIS BANK DUNIA**
- 29** Pengendalian Nyamuk Anopheles
Penular Malaria di Nusa Tenggara
Timur
Oleh **INDRIYANI TAKESAN**
- 33** Cerita Penjaga Hutan di Sumba Timur:
Hidup Kami Bergantung pada Alam
Oleh **AURELIA GRACIA**
- 37** Mencari Alasan Mengapa Orang
Indonesia Rela Menjual Suara di
Pemilu?
Oleh **ANHAR DANA PUTRA**
- 40** Diskusi Instagram Live dan Podcast
Basuara
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Foto cover: **Dok. Yayasan BaKTI**

MENGENAL FORUM DISABILITAS MAROS

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Maros mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Pengesahan peraturan daerah (Perda) tersebut adalah respons Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengimplementasikan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros adalah langkah maju dalam upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya Penyandang Disabilitas, sehingga patut diapresiasi. Karena sampai akhir tahun 2023, masih banyak daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang belum membuat kebijakan terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Tahun 2022 Pemerintah INKLUSI-BaKTI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maros mengimplementasikan beberapa kebijakan inklusif, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Implementasi Perda tersebut dimulai dengan penyusunan peraturan bupati (Perbup), karena sekitar 4 tahun setelah ketuk palu dan penomoran, belum ada aturan turunan yang dibuat. Penyusunan Perbup baru di mulai pada tahun 2023, dan di antara Perbup yang akan dibuat adalah Perbup mengenai Komisi



Daerah Disabilitas, Perbup Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dan Perbup Unit Layanan Disabilitas.

Di samping usulan pembentukan Perbup, isu lain yang sering muncul pada setiap pertemuan adalah mengenai perwakilan Penyandang Disabilitas yang harus menjadi wakil dan mengatasnamakan Penyandang Disabilitas dalam setiap pembahasan Perbup maupun kegiatan-kegiatan lain, terutama terkait dengan kegiatan atau program pemerintah.

Hingga tahun 2022 di di Kabupaten Maros terdapat beberapa organisasi Penyandang Disabilitas, di antaranya HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Maros yang merupakan organisasi untuk Penyandang Disabilitas Perempuan. Gerkatina (Gerakan Tuna Rungu Indonesia) yang menghimpun Penyandang Disabilitas Rungu atau Tuli. PPDI (Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia) dan SHG (*Shelf Health Group*) yang lebih umum, dan NPC (*National Paralympic Committee*) yang menghimpun paralimpik atau olahragawan Penyandang Disabilitas.

Karena itu, kemudian didoronglah pembentuk-an sebuah organisasi disabilitas yang menghimpun berbagai organisasi disabilitas yang ada di Maros,



Foto: Dok. INKLUSI-YAYASAN BaKTI

yang diberi nama Forum Disabilitas Kabupaten Maros (Fordisma). Fordisma dibentuk pada 15 November 2022, dan pengurusnya dilantik pada 05 Desember 2022 oleh Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam. Pembentukan forum ini atas inisiatif Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros saat itu, Nuryadi, dan didukung oleh Program INKLUSI-BaKTI dan SCF (*Sulawesi Community Foundation*) yang merupakan mitra dari organisasi Kemitraan.

Pembentukan Fordisma tidak mudah, dan sempat mendapat tantangan dari beberapa aktivis disabilitas. Mungkin karena sebelumnya, kepedulian dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas umumnya dilakukan oleh organisasi sosial dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Di samping itu, beberapa organisasi yang menghimpun Penyandang Disabilitas telah cukup eksis di Kabupaten Maros. Akan tetapi dukungan dari Penyandang Disabilitas dan organisasi disabilitas jauh lebih kuat untuk pembentukan Fordisma.

Pada suatu pertemuan, Nuryadi mengemukakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Maros akan mengupayakan berbagai upaya untuk pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Selain karena berbagai aturan nasional yang ada, Kabupaten Maros juga mempunyai Perda tentang Peng-

hormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas, serta salah satu misi Bupati Maros periode 2021-2026, yaitu Pelayanan Dasar yang Inklusif. Karena itu, pembentukan Fordisma adalah sebagai upaya untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan untuk kepentingan Penyandang Disabilitas.

Tujuan pembentukan Fordisma adalah: **1** Wadah berhimpunnya Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros dengan berbagai keragaman disabilitas; **2** Sebagai organisasi yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas; dan **3** Sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Maros dalam pembentukan kebijakan terkait dengan Penyandang Disabilitas.

Forum ini dibentuk untuk menjadi wadah Penyandang Disabilitas dan organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Maros, terutama untuk tahap awal adalah ikut serta dalam penyusunan Perbup sebagai turunan dari Perda Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2018. Penyusunan Perbup diperlukan untuk menjadi rujukan bagi Pembentukan Komisi Daerah Disabilitas (KDD) Kabupaten Maros.

Pengurus Fordisma berasal dari berbagai organisasi disabilitas di Kabupaten Maros, di

Susunan Pengurus Fordisma yang pertama kali dibentuk sebagai berikut:

Ketua: **Husain** (perwakilan SHG Panrita)
Wakil Ketua: **Anwar** (perwakilan Gerkatin)
Sekretaris: **Muhammad Ali** (perwakilan PPDI)
Wakil Sekretaris: **Syukur** (perwakilan kelompok konstituen)
Bendahara: **Fatma** (perwakilan kelompok konstituen)

Bidang-bidang

Bidang Advokasi: **Basri** (perwakilan Gerkatin)
Bidang Pengaduan & Perlindungan Disabilitas:

Susanti (perwakilan kelompok konstituen)

Bidang Perlindungan Anak:

Syawal (perwakilan Gerkatin)

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Khadijah (perwakilan kelompok konstituen)

Bidang Informasi dan Komunikasi

Rizky (perwakilan Gerkatin)

Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Supriadi (perwakilan SHG Panrita)

Bidang Perlindungan Khusus

Sewang (perwakilan Masyarakat peduli disabilitas)



antaranya HWDI Maros, SHG Panrita Maros, NPC Maros, Gerkatin Maros, PPDI Maros, dan perwakilan dari Penyandang Disabilitas di 15 desa yang merupakan wilayah Program INKLUSI-BaKTI di Kabupaten Maros, yang juga bergabung di dalam Kelompok Konstituen.

Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam ketika menyampaikan sambutan dalam pembentukan Fordisma menyampaikan permohonan maaf kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros, karena sebagai warga Kabupaten Maros dan warna negara Indonesia, hak-hak mereka belum dipenuhi sepenuhnya. Sebagai Bupati, kata Chaidir Syam “Saya dan wakil bupati serta semua perangkat daerah di Maros akan berusaha untuk memberikan hak-hak Penyandang Disabilitas, untuk itu kami juga berusaha mendapat dukungan dan kemitraan dan berbagai lembaga yang mempunyai kepedulian yang sama.”

Pengurus Fordisma ditetapkan pada tanggal 08 November 2022 melalui Keputusan Bupati Maros No. 1182/Kpts/460/XI/2022 tentang Pembentukan Forum Disabilitas Daerah Kabupaten Maros. Di dalam surat keputusan tersebut, tugas

Fordisma disebutkan sebagai berikut: **1** Mengembangkan, mendiseminasikan, dan mensosialisasikan indikator dan alat pemantauan pemenuhan hak disabilitas; **2** Menyelenggarakan penguatan kapasitas jaringan organisasi disabilitas, masyarakat sipil, lembaga HAM, serta lembaga daerah lainnya; **3** Mengkoordinasikan pemantauan hak-hak disabilitas yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil dan mensinergikan proses dan hasilnya kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya; **4** Mensinergikan proses serta hasil pemantauan dan evaluasi hak Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah dan lembaga daerah lainnya; **5** Mendiseminasikan dan mensosialisasikan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah; dan **6** Melakukan advokasi kebijakan di tingkat daerah terkait hasil pemantauan pemenuhan hak-hak disabilitas.

Penyusunan Program Fordisma

Setelah dibentuk, Fordisma berkantor di salah satu ruangan di Kantor Dinas Sosial Maros. Di sekretariat itulah pengurus mulai menjalankan dan



Foto-foto: Dok. INKLUSI-YAYASAN BaKTI

mengembangkan Fordisma, serta terlibat dalam berbagai kegiatan. Di awal pendirian Fordisma didukung oleh Dinas Sosial Maros dan Program INKLUSI-BaKTI, untuk memastikan Fordisma dapat berfungsi sesuai dengan rencana pembentukannya.

Kegiatan paling awal yang dilakukan Fordisma adalah terlibat dalam pendataan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam pendataan sebagai enumerator adalah salah satu praktik baik, karena mereka lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas. Orang tua atau keluarga Penyandang Disabilitas juga lebih terbuka pada enumerator yang Penyandang Disabilitas.

Fordisma juga ikut mensosialisasikan informasi lowongan kerja untuk Penyandang Disabilitas yang dibuka oleh Alfamart Makassar bekerja sama dengan Yayasan BaKTI. Walaupun jumlah Penyandang Disabilitas yang mendaftar sangat terbatas karena berbagai faktor, Fordisma telah berusaha untuk menyebarkan lowongan tersebut kepada lebih banyak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros.

Pada 31 Mei 2023 di Leang-Leang Maros, Fordisma melaksanakan Rapat Kerja pengurus untuk pertama kalinya, yang dihadiri dan dibuka oleh Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam. Rapat Kerja menghasilkan program untuk masing-masing bidang. Beberapa program utama adalah advokasi kebijakan, yang di antaranya dalam rangka mendorong Pemerintah Kabupaten Maros untuk implementasi Perda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuha Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

Penentu Anggota KDD Maros

Perwakilan Fordisma terlibat dalam penyusunan Peraturan Bupati Maros Nomor 23 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas, yang di dalam Pasal 27 Perbup tersebut menyatakan “Untuk pertama kalinya, ketua, wakil ketua, dan anggota KDD ditunjuk oleh Bupati atas usul Fordisma.” Namun untuk menghasilkan komisioner Komisi Daerah Disabilitas (KDD) Kabupaten Maros yang kompeten dan ber-integritas, maka Fordisma hanya membentuk Tim Seleksi KDD Kabupaten Maros.

Tim Seleksi inilah yang membuat mekanisme dan melakukan perekrutan komisioner KDD Kabupaten Maros. Tim terdiri dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Maros, pekerja sosial profesional, LSM, dan organisasi disabilitas.

Sebagai organisasi yang baru berdiri tahun 2022, Fordisma membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk terus berkembang dan berkontribusi untuk pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Apalagi Fordisma telah mendorong pembentukan KDD, yang sebagian komisionernya diisi oleh anggota Fordisma. Ini adalah hal yang baik, namun perlu memperjelas posisi Fordisma dan KDD, sehingga kedua lembaga tersebut berfungsi dan berkontribusi pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-Yayasan BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



Foto-foto: Dok. INKLUSI-YAYASAN BaKTI

JURNALISME INKLUSIF

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Salah satu *End of Program Outcome* (EPO) Program INKLUSI-BaKTI 2023-2025 adalah Media Membuat Pemberitaan yang Inklusif. Pemberitaan inklusif yang dimaksud di dalam artikel ini adalah pemberitaan yang meliput dan memberitakan kelompok marginal, rentan, dan minoritas dengan memberikan perspektif yang inklusif atau terbuka kepada keragaman dan kesetaraan, memberi ruang dan pandangan/suara, serta meng-advokasikan hak-hak dan kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Pemberitaan inklusif bisa disebut jurnalisme inklusif, karena berita inklusif hanya bisa dihasilkan oleh jurnalis berperspektif inklusif.

Pemberitaan inklusif membuka ruang untuk kelompok-kelompok yang selama ini berada di pinggiran karena dianggap tidak penting, tidak populer, dan diabaikan dalam pemberitaan. Pemberitaan inklusif menempatkan semua orang dari berbagai latar belakang dan status sebagai pihak yang mempunyai hak yang sama untuk ditampilkan secara berimbang di dalam pemberitaan media. Dalam pemberitaan inklusif, semua orang mendapat peliputan dan pemberitaan yang sama, baik untuk menjaga dan melindungi hak-haknya sebagai manusia dan warga, maupun untuk mengadvokasikan kepentingannya.

Karena itu, berita inklusif tidak sekadar menginformasikan secara berimbang, tetapi juga perlu memberikan perspektif, pembelajaran, perubahan, dan perbaikan. Isu-isu masyarakat miskin, marginal, rentan, dan minoritas menjadi tema-tema utama dalam pemberitaan inklusif, karena selama ini kelompok-kelompok tersebut tidak mempunyai akses terhadap media. Bahkan tidak sedikit berita yang ada semakin menempatkan kelompok-kelompok tersebut dalam posisi rentan.

Istilah dan Diksi yang Bias

Istilah “janda, anak nakal, penyandang cacat, cacat, suku terasing, dan kafir” masih umum digunakan masyarakat dan ditemukan dalam pemberitaan media massa. Istilah-istilah tersebut sangat bias dan merendahkan orang-orang yang menyandangnya. Artinya jurnalis dan media massa ikut memberi stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang tertentu karena mempopulerkan istilah-istilah yang bias.

Istilah ‘janda’ melekat pada perempuan yang bercerai atau perempuan yang ditinggalkan suaminya karena mati. Istilah ini setara dengan ‘duda’ yang digunakan untuk menyebut laki-laki yang berpisah dengan istrinya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Namun, dibandingkan dengan istilah ‘duda’ yang dianggap biasa saja, istilah ‘janda’ mengandung makna yang merendahkan perempuan. Janda identik dengan perempuan penggoda. Karena itu, istilah ‘perempuan kepala keluarga’ atau ‘pengasuh tunggal/single parent’ dianggap lebih baik untuk menggantikan istilah ‘janda’ yang bias dan merendahkan.

Istilah ‘anak nakal’ adalah istilah yang diberikan kepada anak-anak yang dalam beberapa hal sangat aktif, tidak bisa diam. Namun, penggunaan istilah ‘anak nakal’ untuk menyebut anak-anak ini tidak tepat. Karena istilah ‘nakal’ disamakan dengan istilah ‘tindak pidana’. Ini diperkuat legalisasinya di dalam aturan hukum nasional, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut, anak nakal didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam Masyarakat (Pasal 1 ayat 2).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan istilah ‘anak nakal’ tidak digunakan lagi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun istilah anak apakah masih digunakan oleh masyarakat, aparat penegak hukum, dan

digunakan di media massa. Istilah yang diajukan untuk menggantikan istilah ‘anak nakal’ di antaranya ‘anak berhadapan dengan hukum’ dan ‘berkonflik dengan hukum’.

Istilah ‘cacat’ dan ‘penyandang cacat’ yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang memiliki keterbatasan dan hambatan. Istilah tersebut digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang Penyandang Cacat mendefinisikan ‘penyandang cacat’ adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental. Istilah ‘penyandang cacat’ sudah tidak digunakan lagi dalam instrumen hukum nasional setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebelum-nya pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Orang Dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities* atau CRPD 2006) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

CRPD mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 1). Istilah ‘penyandang disabilitas’ diajukan untuk menggantikan istilah ‘penyandang cacat’. Istilah lain yang lebih manusiawi adalah ‘difabel atau difabilitas’. Difabel adalah singkatan dari Bahasa Inggris *differently abled people* yang berarti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah difabel dipopulerkan oleh Mansour Fakih dan Setya Adi Purwanto (seorang difabel netra). Gagasan penggunaan difabel atau difabilitas merupakan perubahan konstruksi sosial dalam memahami difabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan (penyandang cacat) (Yulianto, 2016).

Istilah ‘suku terasing’ digunakan untuk menyebut kelompok masyarakat atau etnis minoritas atau etnis terisolasi yang mempunyai banyak sekali keterbatasan. Istilah ‘terasing’ sangat janggal, karena mereka bukanlah orang asing, tetapi diasingkan oleh penduduk mayoritas



Foto-foto: Dok. INKLUSI-YAYASAN BAKTI

dan sistem pembangunan. Istilah yang dapat digunakan untuk menggantikan 'suku terasing' adalah 'etnis minoritas dan suku minoritas'.

Di Indonesia, istilah 'kafir' digunakan mayoritas umat Islam untuk menyebut mereka yang non muslim. Istilah 'kafir' juga untuk menyebut mereka yang tidak menganut agama resmi di Indonesia yang diakui pemerintah. Karena itu, mereka yang menganut agama/kepercayaan lokal atau agama asli sering disebut sebagai kafir, karena dicap sebagai orang-orang yang menyembah roh-roh atau benda-benda. Sebutan 'kafir' kepada orang-orang yang menganut agama lokal atau agama asli tidak hanya terbatas pada keyakinan atau kepercayaan saja, tetapi berdampak pada mereka. Penganut agama lokal mengalami diskriminasi dan kekerasan, baik yang dilakukan oleh masyarakat, maupun yang dilakukan oleh negara.

Masih banyak istilah dan diksi yang bias, tidak memberikan pembelajaran atau advokasi untuk perbaikan ke arah lebih baik yang digunakan oleh jurnalis dalam pemberitaan. Beberapa di antaranya perempuan malam, perek, anak sial, anak celaka, anak terbelakang mental, orang tidak normal, orang yang dikutuk, orang yang dilaknat, bencong, banci, dan seterusnya.

Forum Media dan Jurnalisme Kemanusiaan

Munculnya istilah dan diksi yang bias di media

adalah sesuatu yang yang tidak bisa dihindari. Jurnalis adalah orang-orang dipengaruhi oleh kehidupan sehari-harinya, sedangkan media adalah wahana yang tidak netral. Kehadirannya tidak selalu diperlakukan dengan pola-pola relasi yang sederhana. Media bisa menjadi wahana untuk mendominasi, menguasai, mengarahkan pikiran publik, merekonstruksikan realitas, dan menanamkan ideologi (Dosi, 2012). Sejumlah studi tentang wacana media di Indonesia yang meninjau dari perspektif wacana kritis, menunjukkan bahwa media tertentu membela ideologi, partai politik, dan komunitas budaya tertentu.

Pemberitaan di media massa adalah pertarungan antara berbagai pihak. Media adalah ruang publik di mana berbagai pihak memperebutkan wacana. Tentu hanya pihak-pihak tertentu yang mempunyai akses di ruang redaksi yang dapat mendominasi pemberitaan. Mereka yang miskin, marginal, rentan, dan minoritas tidak mempunyai akses untuk menjadi berita. Dan Ketika menjadi berita atau diberitakan pun kelompok-kelompok tersebut sering digambarkan secara salah, mengalami cap atau stigma buruk sehingga kondisinya semakin terpuruk.

Karena jurnalis atau wartawan merupakan komponen utama dan penting di dalam media massa, maka dibutuhkan jurnalis yang

Jurnalis adalah orang-orang dipengaruhi oleh kehidupan sehari-harinya, sedangkan media adalah wahana yang tidak netral. Kehadirannya tidak selalu diperlakukan dengan pola-pola relasi yang sederhana. Media bisa menjadi wahana untuk mendominasi, menguasai, mengarahkan pikiran publik, merekonstruksikan realitas, dan menanamkan ideologi.

mempunyai perspektif dan pembelaan terhadap kelompok-kelompok miskin, marginal, rentan, dan minoritas.

Tahun 2022 Program INKLUSI-BaKTI membentuk dan merevitalisasi Forum Media di wilayah program. Disebut merevitalisasi karena Forum Media adalah organisasi koordinasi atau tempat kumpul-kumpul jurnalis yang dibentuk pada Program MAMPU-BaKTI. Forum Media menjadi tempat berdiskusi bagi jurnalis mengenai isu-isu GEDSI dan pertukaran pengetahuan dan informasi di antara jurnalis. Fred Soselisa, Ketua Forum Media Tana Toraja menyatakan “Wartawan itu tidak bisa lagi dikatakan memberitakan sesuatu secara netral atau berimbang saja, karena wartawan juga manusia yang harus memperjuangkan nilai-nilai. Wartawan harus membuat berita yang membawa kepada kebaikan dan perbaikan. Nah Forum Media ini menjadi tempat diskusi untuk menghasilkan berita-berita mengenai perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia dan isu inklusi lainnya dengan harapan membawa kebaikan dan perubahan.”

Sedangkan Saada, Ketua Forum Media Kendari menyampaikan, “di Forum Media, kami bertukar pendapat mengenai berita-berita yang dihasilkan oleh wartawan, sehingga berita-berita mengenai inklusi tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas. Di Forum ini kami mendiskusikan isu-isu dan berita mengenai perempuan, anak dan penyandang disabilitas, sehingga menjadi ruang bagi teman-teman untuk belajar.” Najmi S. Limonu, anggota Forum Media Maros, yang juga jurnalis Sindonews pada Pelatihan Jurnalis di Maros (01/09/2023) menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama antara Program INKLUSI-BaKTI dengan jurnalis. Menurutnya, isu-isu inklusi adalah isu-isu baru dan penggunaan istilah tertentu dalam pemberitaan tentu tidak selalu

terupdate di kalangan jurnalis. Dengan adanya Forum Media, kemudian diskusi dan pelatihan yang dilakukan oleh Program INKLUSI-BaKTI, jurnalis memperoleh pengetahuan dan perspektif untuk pemberitaan pada kelompok rentan dan marginal.

Selama Agustus-Oktober 2023 Program INKLUSI-BaKTI melaksanakan Penguatan Forum Media dan Jurnalis melalui Pelatihan dengan menggunakan Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (Edisi Revisi, 2023). Panduan tersebut dibuat Program MAMPU-Yayasan BaKTI bekerja sama dengan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Makassar, yang kemudian direvisi disesuaikan perspektif dan pendekatan GEDSI.

Pelatihan ini bertujuan mengenalkan perspektif perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GEDSI kepada jurnalis, serta meningkatkan kemampuan jurnalis dalam membuat peliputan dan pemberitaan berperspektif gender, disabilitas, dan Inklusi sosial. Pasca pelatihan akan dilakukan diskusi-diskusi lanjutan sebagai monitoring dan evaluasi untuk melihat bagaimana perspektif jurnalis dalam pemberitaan mengenai isu-isu inklusi.

Jurnalisme kemanusiaan atau jurnalisme inklusif hanya lahir dari jurnalis atau wartawan yang mempunyai perspektif dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang selama ini dianggap pinggiran, tetapi merupakan masalah kemanusiaan. Mereka yang miskin, marginal, rentan, dan minoritas dapat mengakses ruang di media massa, jika terdapat jurnalis yang mempunyai perspektif dan kepekaan, tidak sekadar bisa membuat berita.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-Yayasan BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id

TOXIC RELATIONSHIP **PADA REMAJA**

KETIKA HUBUNGAN RENTAN AKAN EKSPLOITASI SEKSUAL

Oleh **CHANTIKA MAHARANI**



Ilustrasi: Ihsan Dinaed/Ayasan Bakti

Masa remaja adalah salah satu fase penting dalam kehidupan setiap individu, di mana mereka mulai membangun hubungan sosial yang lebih mendalam, termasuk pertemanan yang lebih dekat dan hubungan romantis. Meskipun remaja adalah masa yang penuh potensi untuk pertumbuhan dan pembelajaran, hubungan romantis yang dilakukan remaja dalam fase perkembangan ini rentan mengarah ke hal yang negatif.

Secara biologis, seorang manusia memiliki beberapa fase dalam perkembangannya. Salah satunya adalah fase perkembangan dalam seksualitas yang dijelaskan dalam teori psiko-seksual oleh Sigmund Freud. Dalam teori psikoseksual, remaja di usia 12-17 tahun umumnya tengah mengalami fase genital yang didukung dengan perkembangan fisik secara seksual dan pubertas. Fase genital ini merupakan tahap akhir perkembangan psikoseksual, pada fase ini seseorang akan mengalami perubahan yang besar dalam dirinya, seperti perubahan seksual primer dan sekunder yang mereka alami.

Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja pada tahap ini sedang memulai proses kematangan seksual. Kematangan ini dapat mendorong mereka untuk mengeksplorasi perasaan ketertarikan terhadap lawan jenis mereka karena perubahan hormonal heteroseksual yang mereka alami. Perubahan hormonal dan fisik, ditambah dengan ketidakstabilan psikologis yang seringkali terjadi pada remaja membuat hubungan remaja menjadi rentan akan hal negatif.

Toxic Relationship dalam Hubungan Remaja

Toxic relationship atau hubungan yang merugikan satu atau lebih pihak yang terlibat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kerugian dalam hubungan dapat mengambil berbagai bentuk termasuk kontrol berlebihan, perasaan tidak nyaman, dan eksploitasi seksual. Hal ini menjadi masalah serius, terutama saat

Ciri-ciri dari hubungan *toxic* adalah rasa tidak aman, penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol, menuntut, mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, mengkritik secara negatif, ketidakjujuran, ketidakpercayaan, serta komentar dan sikap yang merendahkan.

remaja yang masih dalam proses pencarian identitas dan pengalaman pertama dalam menjalani sebuah hubungan. Seringkali, hubungan antara pasangan remaja yang sedang mencari jati diri dan dalam fase genital akan mengeksplorasi banyak hal yang mereka belum pernah mereka ketahui utamanya mengenai hal berbau seksual.

Ciri-ciri dari hubungan *toxic* adalah rasa tidak aman (*insecurity*), penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol (*abuse of power and control*), menuntut (*demanding*), mementingkan diri sendiri, mengkritik secara negatif, ketidakjujuran, ketidakpercayaan, serta komentar dan sikap yang merendahkan.

Salah satu karakter yang dapat ditemukan pada hubungan yang *toxic* adalah *demanding* atau menuntut. Contohnya adalah dengan menuntut untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau tidak disetujui, dengan begitu mereka akan mencoba bahkan memaksa untuk melakukan tindakan seksual bersama pasangannya. Pihak yang menuntut tersebut kerap menggunakan penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol, sehingga dapat memanipulasi pasangannya untuk melakukan hal-hal yang ia kehendaki. Hal ini kemudian dapat menimbulkan tekanan dan keterpaksaan bagi mereka, sehingga rentan untuk menjadi objek eksploitasi seksual.

Ketika Eksploitasi Seksual Terjadi

Pada beberapa kasus, remaja yang mengalami eksploitasi seksual seringkali belum memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang

seharusnya menjadi batas-batas seksual yang sehat, sehingga mereka dapat dengan mudah menjadi korban manipulasi dan tekanan dari pihak pelaku.

Pelaku mungkin menggunakan teknik-teknik seperti memanipulasi perasaan korban, membuat mereka merasa bersalah (*gaslighting*), atau menciptakan rasa takut agar korban tidak berani berbicara tentang pengalaman yang mereka alami. Hal tersebut kemudian membuat korban merasa bahwa mereka harus bertahan dalam hubungan tersebut meskipun mereka merasa tidak nyaman atau tersakiti.

Selain itu, remaja yang mengalami eksploitasi seksual seringkali merasa takut untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Salah satunya adalah karena stigma sosial yang masih melekat pada isu-isu seksual, terutama ketika remaja terlibat. Mereka khawatir akan dicap sebagai individu yang "tidak benar". Hal ini dapat menghambat mereka untuk mencari bantuan atau melaporkan kasus eksploitasi seksual yang mereka alami.

Remaja juga dapat merasa takut akan reaksi negatif dari anggota keluarga dan teman-teman mereka. Mereka mungkin takut bahwa orang lain tidak akan memahami atau bahkan menyalahkan mereka atas situasi yang mereka alami. Hal ini membuat remaja korban eksploitasi seksual seringkali merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan sosial yang cukup.

Konten Intim Non-Konsensual Menjadi Ancaman Terberat

Penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang rentan dialami oleh remaja dalam hubungan. Hal ini menjadi ancaman terberat dalam hubungan remaja. Ketika

Hal yang dapat dilakukan oleh keluarga maupun orang terdekat dalam mengedukasi remaja:

1 Melakukan Komunikasi Terbuka

Ajarkan remaja pentingnya komunikasi terbuka dalam hubungan. Mereka harus merasa nyaman berbicara tentang perasaan, keinginan, dan masalah mereka dengan pasangan mereka tanpa takut dihakimi atau dicap.

2 Mengajarkan soal Persetujuan & Penghormatan

Tekankan bahwa persetujuan adalah hal yang sangat penting dalam hubungan. Remaja harus memahami bahwa mereka harus selalu mendapatkan persetujuan dari pasangan mereka sebelum bertindak. Ajarkan pula untuk menghormati satu sama lain. Mereka harus memahami bahwa setiap individu memiliki hak dan batas pribadi yang harus dihormati.

3 Mengajarkan soal Batasan yang Sehat

Bantu remaja dalam menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan mereka. Mereka harus tahu kapan harus mengatakan "tidak" jika mereka merasa tidak nyaman dengan sesuatu, dan mereka juga harus menghormati batasan yang ditetapkan oleh pasangan mereka.

4 Bantu Mereka Memahami Emosi

Ajarkan remaja untuk memahami emosi mereka sendiri dan pasangan mereka. Hal ini dapat membantu mereka mengatasi konflik dengan cara yang lebih sehat.

5 Identifikasi Tanda-Tanda Toxic Relationship

Beritahu remaja tentang tanda-tanda kekerasan atau penyalahgunaan dalam hubungan. Mereka harus tahu bagaimana mengenali tanda-tanda ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka jika terjadi situasi yang tidak nyaman dan mengancam.



salah satu pihak dalam hubungan merasa terhina, marah, atau ingin membalas dendam, mereka mungkin memutuskan untuk mempublikasikan konten intim dari pasangan mereka sebagai bentuk kemarahan mereka. Hal ini tidak hanya merupakan tindakan melanggar privasi, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan psikologis yang signifikan pada korban, seperti rasa malu, depresi, dan trauma.

Dalam mengatasi ancaman penyebaran konten intim non-konsensual ini, penting untuk memberikan pendidikan tentang hubungan yang sehat, persetujuan, dan batas-batas seksual kepada remaja. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi serius dari penyebaran konten intim non-konsensual dan mendorong tindakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku. Perlindungan korban dan akses ke dukungan psikologis juga sangat penting untuk membantu mereka pulih dari dampak yang merusak. Selain itu, membantu remaja mengidentifikasi tanda-tanda hubungan tidak sehat dan memberikan dukungan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat juga bisa menjadi langkah penting dalam mengurangi resiko eksploitasi seksual melalui penyebaran konten intim non-konsensual dalam hubungan remaja.

Dampak Psikologis dari Eksploitasi Seksual dalam Hubungan Remaja

Bentuk dampak psikologis eksploitasi seksual dalam hubungan remaja adalah masalah serius yang bisa berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mereka. Korban eksploitasi seksual sering mengalami berbagai masalah emosional dan psikologis yang menghantui mereka.

Kecemasan adalah dampak yang umum terjadi. Korban mungkin merasa cemas karena merasa tidak aman dalam hubungan mereka atau karena takut pengalaman buruk tersebut akan berulang. Depresi, perasaan sedih yang mendalam, dan kehilangan minat pada aktivitas yang mereka nikmati juga sering terjadi. Mereka juga seringkali merasa rendah diri, terutama jika mereka merasa mereka adalah penyebab masalah tersebut.

Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah sebuah trauma. Pengalaman traumatis ini bisa menyebabkan korban mengalami stres pasca-trauma (PTSD), yang ditandai dengan kejadian yang menghantui, mimpi buruk, dan reaksi emosional yang kuat terhadap peristiwa tersebut. Trauma ini bisa memengaruhi hubungan korban dengan orang lain, termasuk teman, orang tua, dan anggota keluarga.

Tindakan manipulatif yang dilakukan oleh pasangan seringkali membuat korban merasa terjebak dan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka tidak ingin lakukan. Hal ini bisa merusak kepercayaan diri mereka dan membuat mereka merasa bahwa mereka kehilangan kendali atas hidup dan tubuh mereka.

Pencegahan dan Penanganan

Untuk mencegah dampak dari *toxic relationship* pada remaja, sangat penting memberikan pemahaman kepada remaja tentang hubungan yang sehat dan mengenali tanda-tanda eksploitasi seksual. Orang tua dan sekolah berperan dalam memberikan pendidikan kepada remaja mengenai edukasi seksual, hubungan sehat, dan hak individu.

Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana remaja merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa takut dicap atau dihakimi.

Apabila eksploitasi seksual telah terjadi, dukungan psikologis, konseling, dan terapi sangat penting bagi korban. Hal ini dapat membantu mereka mengatasi dampak psikologis dan emosional dari pengalaman traumatis, serta memberikan dukungan yang diperlukan selama proses pemulihan. Dukungan dan perlindungan pertama terhadap korban eksploitasi seksual remaja juga bisa didapatkan dalam Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang memudahkan korban atau pelapor dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta untuk mencatat kasus tersebut.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasauddin, Makassar & dapat dihubungi via email: chantikamaharani24@gmail.com

GARUDA ENERGI NUSANTARA MELEBARKAN SAYAP HINGGA KE DESA

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Pada tahun 2018, Yayasan BAKTI menghadirkan praktik cerdas pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel dengan pendekatan kewirausahaan sosial di panggung Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke 8 di Makassar. Adalah Garuda Energi Nusantara atau disebut GEN Oil yang digawangi oleh Andi Hilmy Mutawakkil, pengampu praktik cerdas ini.

Dari survei yang telah dilakukan GEN Oil, setiap ibu-ibu rumah tangga rata-rata menghasilkan 50-100 ml jelantah per hari atau sekitar 5 kg per bulan. Di wilayah perkotaan seperti kota Makassar sendiri terdapat 300 ribu rumah tangga, yang artinya ada potensi hingga 1 juta liter setiap bulannya yang dapat diserap menjadi biodiesel. Jumlah ini belum termasuk dari sumber pelaku usaha seperti perhotelan, kuliner, industri makanan dan lainnya. Saat ini GEN Oil baru menyerap 15-30 ribu liter setiap bulannya dari pemberdayaan 30 unit bank minyak jelantah di Makassar.

Jika sebelumnya wilayah kerja GEN Oil hanya fokus di Kota Makassar dengan bank jelantah yang tersebar di beberapa titik, tahun 2022 perusahaan energi yang digagas sekelompok anak muda ini melebarkan sayap ke desa-desa di Kabupaten Pangkep.

GEN Oil bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pangkep melalui dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) mulai menghimpun jelantah dari rumah tangga. Di awal kerja sama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)



Aktivitas penerimaan tabungan jelantah oleh agen lingkungan dari warga yang menjadi nasabah di sebuah desa di Kabupaten Pangkep. Foto: **Dok. GEN Oil**

memfasilitasi pertemuan antara pihak GEN Oil dan sejumlah pemerintah desa (pemdes). Beberapa pemerintah desa dikumpulkan melalui Posyantek (penyuluh teknologi tepat guna desa), guna mendiskusikan lebih jauh kegiatan pengembangan Bank Jelantah di desa-desa yang ada di Kabupaten Pangkep.

Pertemuan GEN Oil dan Pemerintah Desa yang Difasilitasi Dinas PMD Pangkep

Dari segi bisnis model GEN Oil menciptakan platform bank minyak jelantah dengan melibatkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan yang peduli untuk bekerja sama menghadirkan bank minyak jelantah RTRW dengan konsep pemberdayaan. CSR perusahaan berperan memfasilitasi infrastruktur unit bank minyak jelantah. 1 unit bank minyak jelantah dirancang untuk dapat menjangkau 300 nasabah dan dikelola swadaya oleh masyarakat dengan konsep *sharing* ekonomi.

Minyak goreng bekas atau minyak jelantah, yang biasanya hanya dibuang, oleh GEN Oil melalui Bank Jelantah dapat ditukar dengan minyak yang baru.



Minyak jelantah yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi biodiesel. Biodiesel, salah satu energi alternatif untuk menggerakkan mesin diesel seperti mesin mobil truk, mesin pabrik, pembangkit listrik dan juga motor perahu yang digunakan nelayan.

Pada saat sosialisasi program Bank Jelantah dilakukan, antusiasme warga di luar ekspektasi GEN Oil, lebih dari 200 perwakilan rumah tangga hadir. Saat ini, Bank Jelantah sudah ada beberapa unit, salah satunya di Kecamatan Mandalle, Desa Coppo Tompong. Bank Jelantah di desa ini dikelola 1 agen yang mencakup 300 rumah tangga di wilayah kerjanya.

Sosialisasi Bank Jelantah Bersama Masyarakat Desa

“Kami sedang menjangkau 1.000 nasabah baru dan 5 agen lingkungan. Secara bertahap akan diupayakan sampai 6 ribu rumah tangga di Kabupaten Pangkep menjadi penerima manfaat program Bank Jelantah” ungkap Hilmy.

Mekanisme kerja sama pengelola Bank Jelantah di desa memberdayakan masyarakat sebagai agen setempat. Adapun proporsi sharing ekonominya adalah 20% dari nilai jelantah yang dikumpulkan. Untuk nasabah sendiri yang kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga akan mendapat nilai uang sebesar 4

ribu rupiah per kilogram untuk setiap jelantah yang disetorkan. Nilai ini dapat disimpan menjadi tabungan yang kemudian bisa dicairkan dalam bentuk minyak baru kemasan seperti yang dijual di pasaran. Bank Jelantah ini juga memberdayakan warung setempat sebagai penyedia minyak kemasan. Pelibatan ini sebagai bagian dari *circular economy*.

Aktivitas penerimaan tabungan jelantah oleh agen lingkungan dari nasabah

Pengembangan Bank Jelantah di Kabupaten Pangkep sebagai mata rantai suplai minyak bekas untuk pabrik biodiesel bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal ini CSR Bank Sulselbar, Bank Mandiri, Astra dan Bank Indonesia. Dalam kerja sama ini, GEN Oil bertindak selaku penyedia *platform*, sementara pihak CSR menyediakan infrastruktur yang diperlukan.

Dalam operasional Bank Jelantah, Gen Oil bekerja dengan perseorangan dan agen lingkungan. Agen lingkungan adalah mereka yang menjadi pengelola penimbangan jelantah di unit bank. Untuk mempermudah komunikasi nasabah dan pengelola Bank Jelantah, tiap agen memiliki grup Whatsapp masing-masing untuk wilayah kerjanya.



1 Sosialisasi Bank Jelantah bersama masyarakat desa
 2 Aktivitas penerimaan tabungan jelantah oleh agen lingkungan dari nasabah 3 Buku Tabungan Minyak Jelantah milik warga.
 Foto: Dok. GEN Oil

“Kami mengupayakan setiap titik tidak ada lagi minyak yang terbuang atau dikonsumsi berulang oleh masyarakat. Dengan 300 nasabah per lokasi, kurang lebih ada 1.500 liter jelantah yang bisa dikumpulkan agar tidak menjadi masalah lingkungan” ujar Hilmy yang juga sebelumnya aktif dalam kegiatan-kegiatan HIPMI PT.

Saat ini Hilmy terus giat mengupayakan lebih banyak lagi CSR yang mau kolaborasi agar upaya perluasan manfaat dari program berkelanjutan ini bisa hadir di setiap rumah masyarakat sekitar.

Aktivitas penerimaan tabungan jelantah oleh agen lingkungan dari nasabah

Kapasitas pabrik pengolahan biodiesel saat ini adalah 1.000 liter/hari. Dengan kapasitas ini, masih memungkinkan menyerap semua jelantah yang masuk per hari karena penggunaan teknologinya lokal, sehingga volume produksi bisa disesuaikan.

Lokasi pabrik Pangkep tepatnya di Jl. Kelapa Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Untuk operasional pabrik pengolahan jelantah, tim yang bekerja terdiri dari 5 orang tenaga lokal. Hilmy menargetkan ada 30 titik di Kabupaten Pangkep. Saat ini 5 titik dicover oleh CSR Bank Sulselbar. Beberapa lokasi bank minyak jelantah di Pangkep nanti akan dikelola oleh Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Pengumpulan minyak jelantah oleh masyarakat, juga berkolaborasi dengan penyuluh teknologi tepat guna desa (Posyantekdes).

Kebutuhan akan bahan bakar diesel hari ini sangat besar jumlahnya, dimana kebutuhan ini dapat disediakan dari biodiesel bersumber dari minyak jelantah. Jumlah produksi GEN Oil saat ini masih jauh lebih kecil dari kebutuhan pasar, olehnya mereka lebih

banyak berfokus untuk mendapatkan suplai bahan baku dan mengendalikan harga pokok produksi.

GEN Oil menggandeng CSR untuk bisa sama-sama memperluas dampak dan penyerapan limbah jelantah di masyarakat. Selain itu juga menargetkan lebih banyak lagi pihak swasta yang menyerap produk akhir seperti pelaku industri yang membutuhkan BBM diesel untuk operasional, salah satunya pabrik semen yang kebutuhannya lebih dari 1 juta liter setiap bulannya.

Selain sedang mengupayakan agar ada lebih banyak lagi CSR yang mengambil peran membantu memperluas dampak dari program bank minyak jelantah, GEN Oil juga sedang mengembangkan konsep *Business to Government*. Konsep ini diterjemahkan dengan membuat *franchise* pengolahan biodiesel di daerah/ kabupaten dengan model kemitraan seperti yang ada di Pangkep. Hal ini tentu akan lebih efektif memperluas dampak yang diharapkan dalam penyediaan energi skala lokal dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat.

Dalam 1-3 tahun ke depan GEN Oil merancang bisnis model dengan melibatkan setiap pemerintah daerah di Indonesia, menghadirkan model ini ke dalam program pemerintah guna menghadirkan solusi inovatif dan bernilai ekonomi yang akan menyehatkan masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk minyak jelantah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Lebih lanjut mengenai praktik cerdas ini silahkan menghubungi:
Andi Hilmy Mutawakkil, CEO Garuda Energi Nusantara Oil
 Email: genoil007@gmail.com

PEREMPUAN PAPUA SALING DUKUNG KESEHATAN MENSTRUASI

Bagian II- Selesai

Oleh **NARRISWARI**

Gagasan pembalut kain sebagai media untuk membuka ruang bicara menstruasi berawal dari keluhan sekelompok perempuan di Padukuhan Kelor Kidul, Gunung Kidul, Yogyakarta, terhadap harga satu paket pembalut kain yang ditawarkan Biyung.

Tahun 2018, sepaket pembalut kain dijual oleh Biyung dengan harga Rp100.000, angka yang bagi sebagian orang lebih baik dihabiskan untuk kebutuhan lainnya.

Mereka lalu bersiasat, meminta Biyung untuk mengajari cara pembuatannya. Alhasil, selain gratis mereka turut membangkitkan evaluasi personal Biyung.

Di sisi lain, perempuan kerap ditunjuk menjadi salah satu penyumbang sampah melalui penggunaan pembalut sekali pakai.

Westiani Agustin, Direktur Biyung, menjawab persoalan tersebut dengan mengajukan pembalut kain sebagai salah satu solusi menghentikan polusi sampah. Namun, apabila solusi justru tidak aksesibel, hanya dapat dijalani oleh sekelompok orang maka tak berarti apapun.

Westiani menjelaskan sesi perkenalan bertujuan sebagai pemantik pembicaraan menstruasi. Tidak sedikit wajah meragu timbul ketika mendengar metode perkenalan menggunakan tanya jawab

terhadap teman sebelahnya tentang nama, judul lagu yang disukai, dan cerita pengalaman menstruasi pertama. Mereka mengakui, itu kali pertama kata ‘menstruasi’ bebas dikatakan dan didengarkan di depan umum.

Bisa jadi, menurut Westiani, kekikukan partisipan pelatihan menceritakan ulang pengalaman menstruasinya secara publik dan menggunakan pengeras suara juga ditengarai minimnya keterlibatan mereka dalam pertemuan.

“Dalam pertemuan desa atau sosialisasi pada umumnya, mereka dilibatkan sebagai peserta saja. Mereka diundang untuk hadir, tapi sampai sana hanya duduk, mendengar,” kata Westiani.

Pertemuan publik memungkinkan perempuan untuk sejenak menyisihkan beban pekerjaan rumah tangga sekaligus bersua dengan teman-teman. Undangan yang menghadirkan perempuan sebatas pengisi daftar absen tetap disambut dengan semangat, sekadar duduk melepas penat.

Format kegiatan yang kaku, misalnya mengikutsertakan perempuan sebagai partisipan pasif justru mengurungkan keberanian berlatih berbicara di depan umum.

Metode pembelajaran yang partisipatif menjadi corak tersendiri dalam pelatihan ini. Memasuki ruang pelatihan, partisipan sudah mendapatkan sekantong paket alat bahan pembalut kain, spidol, dan buklet dua lembar berisi panduan pembuatan dan perawatan pembalut kain serta ilustrasi siklus menstruasi yang digunakan untuk berlatih menghitung siklus menstruasi, termasuk penjelasan tiap fasenya.

Mata berbinar dari partisipan menyambut proses *unboxing* kantong berisi alat dan bahan untuk menjahit pembalut kain. Satu persatu, Westiani mengenalkan nama-nama peralatan, disongsong celetukan dari beberapa partisipan yang sudah terlebih dahulu mengenalnya. Ada benang, jarum jahit, pendedel, mata nenek, empat bahan kain, dan contoh pembalut kain ukuran panty (kecil).

“Wah.. kalau warna begitu saya mau! Cantik-cantik sekali..,” partisipan saling melempar komentar sembari menatap lekat-lekat terhadap deretan bahan kain yang digunakan, lantaran bercorak atau bermotif terang.

“Orang bisa tanya-tanya... eh, mama ada jemur kain apa itu? Bukan lagi disebut kain kotor,” celetuk partisipan lainnya.

Pelatihan berlanjut dengan belajar menghitung siklus menstruasi, yang dipertegas oleh Biyung



sebagai bagian dari siklus hidup. Rode menarik kesimpulan dari partisipan pelatihan bahwa pengetahuan tentang menghitung siklus menstruasi baru pertama kali mereka dapatkan.

Siklus menstruasi merupakan periode antara hari pertama menstruasi terakhir menuju menstruasi berikutnya. Dalam satu siklus menstruasi dapat berlangsung selama 28 hari. Durasinya amat beragam, bisa kurang atau lebih dari 28 hari, tergantung individu yang mengalaminya. Selama siklus berjalan, tampak fase-fase yang menyiratkan polah tingkah seseorang.

“Ada yang pernah mengamati, anak perempuan di rumah tiba-tiba dandan cantik, ada anyam (kepong) rambut macam-macam gaya... Baru kita sebagai mama keluar kata-kata, “Ih *cakadidi* apa (genit)?” Padahal bisa jadi dia sedang ada di fase ovulasi karena merasa bergairah dan ingin menata diri sebaik mungkin,” kata Westiani.

Penjelasan ini memicu senyum malu dari wajah para mama. Mereka mengiyakan pernah menyaksikan anak perempuan di rumah sekonyong-konyong mempercantik diri.

Rode menyambung, “Saya juga baru tahu kalau perempuan itu punya dua otak. Semua peristiwa yang terjadi dalam kita punya diri ternyata direkam oleh rahim. Kita perempuan itu unik. (Pada situasi

perempuan sedang hamil) harus hati-hati karena apa yang kita pikirkan, rasakan, dan sikap kita terhadap orang lain karena direkam oleh janin.”

Perempuan lantas menyadari kelincuhan mereka mengerjakan dua atau tiga pekerjaan sekaligus dalam satu waktu merupakan bagian dari keistimewaan individu memiliki rahim karena kepemilikan sistem kerja ganda yang dikelola otak dan rahim.

Pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan tidak berhenti pada partisipan, tetapi membantu sesama perempuan lainnya di luar lingkaran pertemuan. Para mama yang terlibat lantas menyelidiki kembali pengalaman mereka hidup dengan anak-anak perempuan.

Pembalut Kain: Usang dan Solusional

Pembalut kain bukan temuan baru. Butuh penelusuran jeli siapa penciptanya, mungkin saja sesungguhnya malah dikonkritkan oleh perempuan lalu berkembang dengan masing-masing inovasinya sesuai konteks wilayah.

Perempuan yang terlibat dalam pelatihan menunjukkan ragam reaksi terhadap pembalut kain, tapi bukan ketakjuban akan sesuatu yang mutakhir. Mereka jamak mengenalnya sebagai duk atau “kain kotor.” Istilah duk, menurut Rosa yang



(Kiri) Menutup sesi workshop Menstruasi Sehat, Westiani dari Biyung menunjukkan gerakan yoga untuk mengurangi kram menstruasi. (Kanan atas) Seorang partisipan workshop Menstruasi Sehat, menggambar pola potong untuk menjahit pembalut kain. (Kanan bawah) Dua partisipan mempraktikkan cara membalik pembalut kain agar bagian kain katun yang digunakan sebagai permukaan pertama menampung darah menstruasi berada di posisi luar.

Foto: **Project M/Narriswari**



berbahaya?," gugat seorang ibu dalam pelatihan di Sentani, September tahun lalu.

Kegeramannya muncul seketika mendengar pemaparan dari tim Biyung perihal komposisi pembalut sekali pakai yang mengandung bahan pemutih dan hasil daur ulang kertas untuk menurunkan biaya produksi sepadan dengan harga penjualan.

Usai terpapar informasi utuh tentang komposisi pembalut pabrikan membangkitkan komitmen Jeremina beralih pada pembalut kain. Berulang ia mendengar pengalaman perempuan terdekatnya yang mengalami infeksi kesehatan reproduksi, seperti ruam, gatal, hingga infertilitas, akibat penggunaan pembalut pabrikan. Buatnya, memakai pembalut kain membuatnya lebih kritis dan peduli terhadap tubuh maupun lingkungan.

Selain itu, penggunaan pembalut kain membuatnya berhemat banyak untuk tidak mengikuti godaan iklan pembalut sekali pakai yang menawarkan beragam kategori, misalnya *day*, *night*, berbau siri, bersayap atau tanpa sayap. Konon tiap bulan ia harus membeli dua jenis pembalut pabrikan.

"Saya harus beli yang malam sendiri, yang pagi sendiri. Sudah beli mahal, baru iritasi dan gatal-gatal!" kata Jeremina.

Febe, sementara itu, mengatakan sejak menstruasi pertama, ia belajar tidak menggunakan pembalut sekali pakai. Sang mama angkatnya sudah mengenal-kain pembalut kain berbahan dasar kain perban yang diisi kain lalu dijahit tangan. Febe pernah tergiur menggunakan pembalut sekali pakai, tapi rasanya kurang nyaman.

Ia mengeluh hal serupa dengan Jeremina, "Saya tidak tahu pasti bahan-bahannya apa tapi rasanya tidak nyaman, bikin gatal. Kalau pakai pembalut kain itu hemat biaya, meminimalisir pengeluaran."

Jika membandingkan dengan produk manajemen kesehatan menstruasi lainnya, pembalut kain merupakan teknologi yang usang. Namun, keputusan memilih pembalut kain adalah kuasa individu atas dirinya.

melacaknya melalui sang mama, dipromosikan oleh misionaris.

Rupanya duk diterima dengan hangat. Selain proses penyebarannya melalui ajaran agama, komposisi bahan pembalut kain mudah didapatkan oleh perempuan kendati lokasi tinggalnya jauh dari perkotaan.

Febe Mabel, seorang tenaga kesehatan yang kerap bertugas di kampung-kampung Pegunungan Jayawijaya, mengungkapkan perempuan kini jauh lebih mengenal pembalut sekali pakai, padahal jauh dari akses perdagangan produk-produk pabrikan. Maka dalam sehari penuh mereka bisa hanya menggunakan satu pembalut sekali pakai.

Ia mengkhawatirkan pemakaian pembalut sekali pakai justru makin memperkuat kerentanan perempuan-perempuan di kampung mengalami infeksi di bagian *genital*, bahkan berujung infertilitas.

Hal ini ditengarai oleh minimnya informasi dan pengetahuan terkait produk pembalut sekali pakai, meskipun bukan hanya dialami perempuan di perkampungan-bahkan juga perkotaan.

"Kenapa kok pihak produsen pembalut ini tidak pernah memberi tahu konsumennya kalau ternyata bahan-bahan pembalut yang mereka bikin

Jeremina dan Febe, sebagai perumpamaan, yang menolak merasa tidak nyaman atau infeksi akibat pemakaian pembalut sekali pakai. Selain itu, Jeremina menggunakan pembalut kain sebagai upayanya menjaga kelestarian lingkungan dari sampah pembalut sekali pakai.

Pembalut kain berkaitan erat dengan kebutuhan air bersih untuk mencucinya. Partisipan pelatihan dari Wamena dan Oksibil mengakui cukup kesulitan mendapatkan air yang tidak berwarna dari sumur.

Di Oksibil, warga menyiasatinya dengan membangun tangki-tangki air penadah hujan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencuci ataupun mandi. Sementara di kota Wamena, Febe membiasakan menguras bak mandi karena ia mempercayai endapan air yang terlalu lama berpotensi menjadi sarang bakteri berkembang biak.

Bantuan pembalut kain untuk perempuan dan anak perempuan pengungsi konflik politik di Papua secara seksama dipilah. Dengan berat hati, Perempuan GIDI menjangkau wilayah pengungsian dengan akses air yang cukup untuk mendukung penggunaan pembalut kain.

Akses air bersih sesungguhnya menjadi kebutuhan bersama, bukan hanya gender tertentu. Melalui kampanye menstruasi sehat menggunakan media pembalut kain, Biyung menyelipkan pesan tuntutan terkait kewajiban penyediaan sanitasi yang sewajarnya menjadi tanggung jawab komunal.

“Sanitasi bagian dari advokasi kita. Penyediaan sanitasi wajib dilakukan pemerintah sehingga mempermudah air bersih untuk pembalut kain, terutama di Tanah Papua. Kamu (pemerintah) bilang ada program-program pembangunan di Papua tapi hasilnya mana. Karena ini berkaitan dengan tuntutan pemenuhan HKSJ juga,” Westiani menandakan.

Keluarga sebagai Agensi Seseorang Mengenal Tubuh

“Saya punya anak perempuan dua, mereka memang masih kecil-kecil tapi sekarang saya lebih siap untuk ajak mereka bicara soal masa yang akan mereka lalui ke depan,” komentar seorang ibu dari Oksibil, namanya Romauli Situmorang.

Romauli merupakan penanggung jawab untuk kelompok produksi pembalut kain pertama di Papua. Usai keterlibatannya dalam pelatihan tahun 2020, ia tekun membagikan pengetahuannya di kota asalnya dengan menggandeng kelompok perempuan sekitar rumah, gereja maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Apabila seseorang telah mengantongi bekal pengetahuan tentang tubuhnya lebih awal, maka ia jauh lebih siap menghadapi situasi beragam mendatang.

Meri, seorang pegawai di Kota Wamena diam-diam mempelajari proses menstruasi melalui kebiasaan tantenya merendam celana dalam hingga bersih dari noda darah.

“Waktu itu saya sempat tanya, ‘itu kenapa?’ lalu mama adek (sebutan untuk adik dari mama) jawab, ‘ini perempuan punya.. Nanti umur-umur berapa juga akan dapat.’ Jadi pas saya dapat, tidak kaget. Saya tahu ini yang namanya menstruasi,” kata Meri.

Membenarkan peribahasa “lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya,” pun dengan tradisi pewarisan antar-perempuan untuk mengatur proses alamiah bulanan. Saya sendiri mengenal pembalut kain sebagai produk manajemen menstruasi pertama. Perjumpaan kami melalui ajaran ibu saya, yang diwariskan oleh nenek.

Ibu saya menampilkan pembalut kain buatan sendiri dari potongan kain katun putih dan dilipat layaknya lumpia, isinya handuk kecil lalu ujung atas dan bawah dibikin jalur untuk tali pinggang. Pemakaiannya mirip dengan cawat. Sementara nenek saya mendemonstrasikan pembalut kain menggunakan sisa-sisa kain jariknya yang menua, penuh motif.

Mama dari Rosa mengajarkan pada kedua anak perempuannya untuk bersiaga membawa handuk kecil tiap pergi sekolah sebagai pertolongan pertama ketika menstruasi datang tiba-tiba.

Tiap keluarga memiliki cara tersendiri untuk menyediakan ruang ramah untuk saling belajar mengandalkan dan mengeluh. Pdt. Matheus menyampaikan pengalaman personalnya dalam keluarga dengan mayoritas didominasi perempuan.

“Saya belajar mendukung dan membantu kakak perempuan justru mulai dari keluarga. Bikin kue... main mainan yang disebut mainan perempuan itu saya kuasai. Kepedulian terhadap kesetaraan sebetulnya sudah tumbuh sejak kanak-kanak,” katanya.

Sejumlah suku di Papua menumbuhkan tradisi inisiasi terkelompok, yaitu perempuan dan laki-laki. Inisiasi dilakukan ketika seseorang mulai menginjak masa akil balik sehingga anggota keluarga berjenis kelamin sama menemani secara intensif, yang dapat berlangsung selama beberapa hari dan bertempat di satu rumah khusus.

Salah satunya kewita, istilah untuk menyebut rumah perempuan dalam budaya Suku Mee. Tutur Rosa, Kewita menjadi ruang personal bagi perempuan – mulai dari nenek hingga perempuan termuda untuk belajar kehidupan sebagai sosok perempuan. Mereka bisa berlatih membuat noken, berkebun, memasak, mengelola kekuasaan dalam politik kesukuan, termasuk memahami pengetahuan tentang tubuh.

Prinsip rumah Kewita sebagai tempat untuk belajar, mengajar, dan saling membantu menginspirasi Rosa melakukan hal serupa dalam bentuk organisasi dengan nama yang sama.

Bagaimana Laki-laki Dapat Terlibat dalam Diskusi Menstruasi Sehat

April 2022, sebuah percekocokan hangat memecah kesunyian kampung Sira di Kabupaten Sorong Selatan. Pasalnya, kelompok perempuan yang terdiri dari 30 mama dan perempuan muda menolak keras kehadiran laki-laki dalam *workshop* edukasi menstruasi sehat dan menjahit pembalut kain.

“Eh.. Tidak! Laki-laki tidak boleh ikut di sini!,” bantah seorang mama, diikuti penolakan lainnya.

Asal muasalnya, beberapa laki-laki sempat datang menyambut rombongan Biyung dan Bentara Papua lalu membantu mempersiapkan ruangan untuk pelaksanaan *workshop*. Usai persiapan, sebagian dari mereka tinggal di suatu pojok ruangan, mungkin berharap dapat bergabung. Westiani lantas menanyakan kepada partisipan mengenai kemungkinan keterlibatan kelompok laki-laki dalam *workshop*, yang dengan cepat dibalas dengan protes oleh mama-mama.

Resistensi ini sangat beralasan. Pihak Bentara Papua menyampaikan kepada Westiani bahwa ruang pertemuan bagi perempuan di Kampung Sira tidak pernah ada. Ketika kelompok perempuan mendengar adanya peluang berkegiatan dan berbicara tentang kesehatan reproduksi, kegembiraan mereka menjadi eksklusif.

“Selama ini acara kampung dan adat selalu yang diundang laki-laki. ini satu bentuk upaya mereka keluar dari kotak mereka,” kata Westiani.

Cerita tersebut mengingatkan saya pada pengalaman serupa ketika terlibat dalam pelatihan di sebuah gereja GIDI di Kota Wamena. Sembari menunggu kedatangan teman lainnya, tim Biyung bersama Perempuan GIDI berbincang dengan beberapa partisipan dan seorang pendeta laki-laki, bernama Niko Mabel.

Kehadirannya sebagai laki-laki satu-satunya sempat memicu keraguan dari partisipan untuk ikut berdiskusi. Biyung dan Perempuan GIDI mengupayakan pertemuan awal sebagai jembatan menuju sesi *workshop*, maka obrolan yang mengemuka terkait situasi kesehatan reproduksi perempuan di Wamena.

(Pdt.) Niko tampaknya menyadari suasana kaku dalam ruangan dipicu olehnya, dengan perlahan beliau berpamitan keluar.

Tema kesehatan reproduksi memang lekat pada gender tertentu, meskipun persoalan sistem reproduksi dapat dialami semua gender. Namun, pada konteks wilayah yang menunjukkan lemahnya pengalaman aktual perempuan untuk memiliki ruang aman berbicara, maka penyelenggaraan pelatihan seperti ini menjadi peluang yang harus direbut oleh individu bermenstruasi.

Selain itu, menciptakan ruang aman untuk berbicara ketubuhan bagi perempuan mustahil dilakukan oleh segelintir orang atau kelompok tertentu, butuh simpul yang beragam dan pengeras suara untuk mendengungkan, misalnya para pemilik wewenang. Salah satunya dari pengalaman personal ibu Romauli terhadap suaminya.

Sebagai seorang pendeta, suaminya mendayagunakan posisinya untuk mendukung kerja sang isteri dalam mengkampanyekan menstruasi sehat. Saat berperan membuka *workshop* menstruasi sehat dan menjahit pembalut kain yang difasilitasi mandiri oleh ibu Romauli, beliau menggaris-bawahi bahwa kita tidak boleh menutup telinga mendengarkan informasi tentang tubuh maupun malu bicarakan.

Sedari awal, gerakan kolaboratif Perempuan Bantu Perempuan Pakai Pembalut Kain di Papua terwujud berkat ketekunan dua sahabat, yang bertumbuh bersama teman lainnya. Namun, proses untuk merawatnya menciptakan jejaring kepedulian lintas denominasi gereja maupun fokus isu kelembagaan.

“Perempuan Papua harus selamat! Tapi tangan saya pendek. Saya berharap ada lebih banyak orang bersemangat meneruskan kerja-kerja ini... Kalau pemerintah konek (responsif), hal seperti ini cepat ditanggapi..,” tutup ibu Romauli.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini adalah bagian dari serial #PendidikanSeksual.

Artikel ini bersumber dari: <https://projectmultatuli.org/bukan-lagi-baru-dan-tabu-perempuan-papua-bersolidaritas-saling-dukungan-kesehatan-menstruasi/>

UPAYA PARA PEMUDA BATU LANTEH JAGA KANTONG AIR SUMBAWA TETAP LESTARI

Oleh **FATHUL RAKHMAN**

Para pemuda Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, resah dengan makin meluasnya ladang jagung. Kebun kopi perlahan berganti dengan jagung. Kelompok Tani Lestari Harapan yang terdiri dari para pemuda desa ini menawarkan alpukat sebagai tanaman selingan sekaligus peneduh kopi selain kemiri. Harapannya, buah alpukat bisa menambah penghasilan petani.

Desa Batu Dulang, dikenal sebagai penghasil kopi dan kemiri. Desa ini juga jadi ekowisata, penghasil madu, rempah, dan berbagai produk perkebunan. Salah satu fungsi penting Batu Dulang sebagai resapan air. Di bawah Desa Batu Dulang ada TWA Semongkat yang jadi sumber air bersih untuk daerah perkotaan Sumbawa. Hasanuddin sadar dengan posisi strategis desanya.

Hasanuddin, Ketua Kelompok Tani Lestari Harapan mencontohkan, dalam satu kebun kopi juga menanam alpukat, rempah-rempah seperti lengkuas, kunyit, dan Dengan sistem tanaman beragam ini, kebun bisa menghasilkan setiap tahun. Hasanuddin memeriksa bibit alpukat dalam wadah polybag di depan halaman rumah di Dusun Semparu, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 17 Juli lalu. Di halaman seluas dua meter itu berderet bibit alpukat sambung.



Bibit alpukat berbagi ruang dengan tiang jemuran. Rumah-rumah warga berbaris mengikuti kontur lahan miring di atas bukit ketinggian 750 mdpl itu. Bibit sehat segera dia pindah ke ladang-ladang. “Dulu, pernah saya tanam 500 bibit, sebagian besar rusak,” kata pria 33 tahun ini. Hasanuddin adalah Ketua Kelompok Tani Lestari Harapan.

Kini, Hasanuddin berupaya memilih bibit-bibit siap tanam baru pindah ke ladang. Dia berupaya meyakinkan petani kalau bibit alpukat itu sehat dan bisa tumbuh subur. Tak perlu perawatan ribet. Kegagalan tanam, katanya, bisa menurunkan kepercayaan petani.

Hasanuddin khawatir kalau awal gagal, petani kapok menanam alpukat. Pilihan membersihkan lahan, kemudian berganti dengan ladang jagung menjadi kekhawatiran Hasanuddin. Desa Batu



Dulang bagian dari desa-desa yang berada di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Lanteh. Luas KPH Batu Lanteh 32.776 hektar mencakup empat kecamatan, yakni Batulanteh, Moyo Hulu, Moyo Hilir dan Moyo Utara. Luasan itu terbagi atas hutan lindung (14.303 hektar), hutan produksi (14.842) dan hutan produksi terbatas (3.631 hektar).

Kalau kondisi lingkungan Desa Batu Dulang rusak, sumber air bersih akan terganggu. Iklim mikro bisa terganggu. “Lihat kemiringan bukit-bukit di sini, ini rawan longsor. Kalau habis pohon penyangga, mudah sekali jatuh,” katanya menunjukkan bukit yang terlihat baru dibersihkan. “Kami akan tanam alpukat di sana.”

Batu Dulang dikenal sebagai penghasil kopi dan kemiri. Kopi perlu tanaman peneduh. Dulu, warga menanam dadap sebagai tanaman peneduh. Lama

Hasanuddin menunjukkan pohon kopi berbuah lebat di Dusun Punik, Desa Batu Dulang. Kopi ini dibudidayakan dengan teknik sambung dengan pohon alpukat sebagai peneduh.

Foto: **Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia**

kelamaan pohon dadap dianggap tak produktif. Warga menebang dadap, membiarkan kopi tanpa pelindung.

Satu sisi, usia tanaman kopi petani di Batu Dulang sudah cukup tua, 20 tahun lebih, bahkan usia 50 tahun. Pohon tinggi menjulang sampai 7 meter.

Ketika musim panen, petani harus memanjat atau menarik dahan. Dulu, ketika masih sangat produktif, kopi di kebun keluarga Hasanuddin mencapai 5-6 ton. Sejak 2014, dia merasakan hasil berkurang. Sekarang maksimal tiga ton. Kondisi sama dirasakan juga petani lain.



Karena kopi dirasakan mulai kurang produktif, petani mulai menebang kopi. Menanam tanaman semusim, seperti rempah-rempah. Seiring kebutuhan jagung tinggi sejak 2014, petani mulai menanam jagung.

Tanaman jagung lebih cepat panen dan hasil penjualan lebih besar dibandingkan kopi. Petani mulai tergoda, kopi mulai berganti jagung. Saat itulah Hasanuddin mulai resah ketika makin banyak petani mengganti tanaman di kebun dengan jagung.

“Harus kita kasih alternatif tanaman yang menguntungkan. Maka alpukat ini pilihan, sambil menjaga lahan agar tidak kering,” katanya. Untuk satu kebun kopi, Hasanuddin contohnya dengan menanam alpukat, rempah-rempah seperti lengkuas, kunyit, dan jahe. Dengan sistem seperti ini, katanya, kebun bisa menghasilkan setiap tahun.

Di Batu Dulang, panen kopi berkisar bulan Juni–Agustus. Saat panen kopi, alpukat sedang berbunga. Setelah panen kopi akan lanjut panen alpukat. Untuk tanaman rempah bisa disesuaikan musim tanamnya. Dengan model penganeka-

ragaman jenis tanaman di dalam satu kebun kopi ini, petani mendapatkan hasil lebih besar. Beda kasus kalau tanaman peneduh hanya mengandalkan dadap atau tanaman non buah. “Sekarang, alhamdulillah, banyak permintaan bibit alpukat,” katanya.

Masalah lain yang dihadapi petani ketika panen alpukat adalah harga rendah. Di tingkat petani, satu kilogram alpukat dibeli oleh pengepul 20 ribu rupiah. Hasanuddin survei ke pasar, harga 35 ribu rupiah. Bersama kelompoknya, dia merancang agar alpukat bisa dibeli koperasi. Mereka juga melatih petani cara panen yang tepat agar bisa memilah alpukat kelas premium dan yang dijual di pasar tradisional. Dia meyakinkan petani dengan lebih tekun merawat, saat panen, dan memilah hasil penjualan alpukat petani bisa lebih besar. “Kerja sama dengan hotel, petani belum paham standar. Jadi itu yang kami latih juga,” katanya.

Ekowisata Buah

Hasanuddin dan Kelompok Tani Lestari Harapan belajar membibitkan alpukat secara



- 1 Perempuan mengupas kemiri di Dusun Punik, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa. Kemiri menjadi tanaman peneduh untuk kebun kopi.
- 2 Bukit di Batu Dulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa yang dulu lebat oleh tanaman kebun perlahan jadi ladang jagung
- 3 Heri Fitrawansyah, petani muda di Desa Batu Dulang mengecek lengkuas di kebunnya. Rempah-rempah menjadi tanaman sela di antara kopi dan tanaman buah.

Foto: **Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia**



otodidak. Mereka membaca di internet, menonton YouTube. Mereka menanam, menyambung, mencari formula pupuk yang tepat. Beberapa kali mencoba gagal, berhasil setelah mencoba belasan kali.

Dia sadar merintis pembibitan alpukat ini bukan pekerjaan mudah. Setiap ada pelatihan, penyuluhan, maupun kegiatan terkait tanaman buah Hasanuddin ikut. Kelompok juga bermitra dengan KPH.

Sebagai daerah yang berhawa sejuk, dia membayangkan Batu Dulang bisa menjadi ekowisata buah. Saat ini, katanya, memang sudah dipromosikan sebagai ekowisata kopi. Pengunjung bisa melihat kebun kopi, ikut saat panen, dan terlibat langsung saat pengolahan. Waktunya hanya berkisar tiga bulan, mulai dari bulan Juni hingga Agustus.

Potensi ekowisata buah, kata Hasanuddin, menjadi potensi besar ke depannya. Tanaman alpukat yang mulai banyak di kebun warga di masa depan bisa bertambah dengan pohon buah-buahan lainnya. Durian, nangka, kelengkeng, duku, mangga, jeruk, apel, bisa ditanam di kebun. Bukan

semata menjadi tanaman peneduh kopi, tapi menjadi kebun khusus buah-buahan.

Selain kebun buah, Batu Dulang bisa jadi sentra bibit buah di Kabupaten Sumbawa. Bahkan bisa menjadi sentra bibit buah untuk Pulau Sumbawa. Selama ini, katanya, bibit buah-buahan didatangkan dari Lombok bahkan Jawa. “Bukan hanya untuk petani, juga seluruh masyarakat. Kalau Batu Dulang tetap terjaga, sumber air bersih akan tetap ada.”

Selain sentra buah-buahan, Batu Dulang juga bisa jadi sentra rempah seperti jahe, lengkuas, kunyit mulai banyak ditanam di kebun warga. Hasilnya tidak sebesar kopi tetapi bisa menambah penghasilan. Apalagi, ini hanya menjadi tanaman sela di kebun. “Rata-rata sekarang sudah mulai banyak yang tanam rempah,” kata Heri Fitrawansyah, anggota Kelompok Tani Rokam Bangkit.

Kebun keluarga Heri sebagian besar tanam kopi. Mertuanya pendiri Rokam Bangkit. Dia meneruskan usaha mengolah kopi. Heri melihat kopi mulai kurang produktif. Bukan semata karena kesuburan tanah, juga usia pohon tua. Dia menunjukkan contoh beberapa tanaman kopi tua tinggi sampai tujuh meter dengan kopi teknik sambung, hanya 1.5 hingga 2 meter. Pohon lebih rendah, buah lebih lebat. Selain itu, dengan tanaman kopi pendek, tidak akan bersaing dengan tanaman peneduh seperti alpukat. “Kalau tanaman kopi lama, sama tingginya dengan tanaman peneduhnya.”

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari <https://www.mongabay.co.id/2023/08/07/upaya-para-pemuda-batu-lanteh-jaga-kantong-air-sumbawa-tetap-lestari/>

CARA INDONESIA MEMERANGI PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT DARI SUMBERNYA DI DARAT

Oleh **TIM BANK DUNIA**

Ubur-ubur terlihat mengapung dikelilingi kantong plastik, gerombolan ikan menghindari kemasan makanan plastik, dan ikan pari manta tampak mengitari jaring yang terbengkalai. Ini adalah cuplikan dari video yang sempat viral pada tahun 2018, memperlihatkan bahwa sampah laut telah mencemari perairan Nusa Penida di Bali, Indonesia. Kondisi ini tentunya membuat hati penonton di seluruh dunia sedih.

Video tersebut menunjukkan apa yang terjadi apabila produksi dan konsumsi plastik tidak dikendalikan. Sejak saat itu, Indonesia telah mengambil tindakan untuk memerangi pencemaran laut. Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berkomitmen bahwa “Indonesia [akan] menerapkan pendekatan yang komprehensif, suatu perubahan sistem secara menyeluruh untuk memerangi sampah plastik dan pencemaran.” Dipelopori oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemkenko Marves), Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (2017-2025) menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70 persen pada tahun 2025 dengan tujuan untuk mengendalikan pencemaran sampah plastik dari sumbernya. Dari sasaran yang ditetapkan tersebut, pemerintah melaporkan tercapainya pengurangan



sebesar 35.36 persen sampah laut pada bulan Desember 2022.

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai sasaran tersebut, Indonesia telah melakukan tiga studi yang didukung oleh Bank Dunia untuk bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan memandu aksi nyata untuk memerangi sampah laut. Studi-studi tersebut menyoroti sumber-sumber utama sampah plastik di laut Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Apa pelajaran yang dapat dipetik dari studi tentang pencemaran sampah plastik di laut Indonesia?

Pertama, alat penangkapan ikan yang terlantar, hilang, atau dibuang (ALDFG) dan alat penangkapan



ikan yang sudah tidak terpakai (EOLFG) menjadi sumber sampah laut yang signifikan.

Alat penangkapan ikan seperti jaring insang berlabuh (*anchored gillnet*), jaring insang berlapis (*trammel net*), dan bubu (*pot*) plastik berisiko tinggi untuk menjadi ALDFG dan mencemari laut. Tanpa langkah pengendalian yang tegas, ini lambat laun akan menimbulkan ancaman “*ghost fishing*”, di mana alat penangkapan ikan yang sudah tua/dibuang menjerat biota laut.

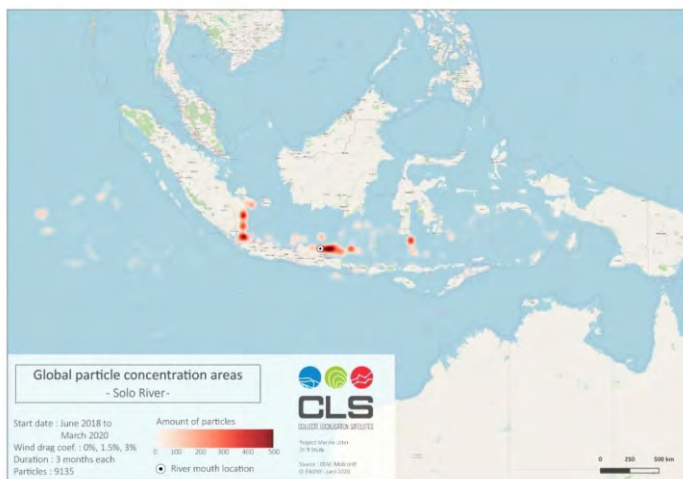
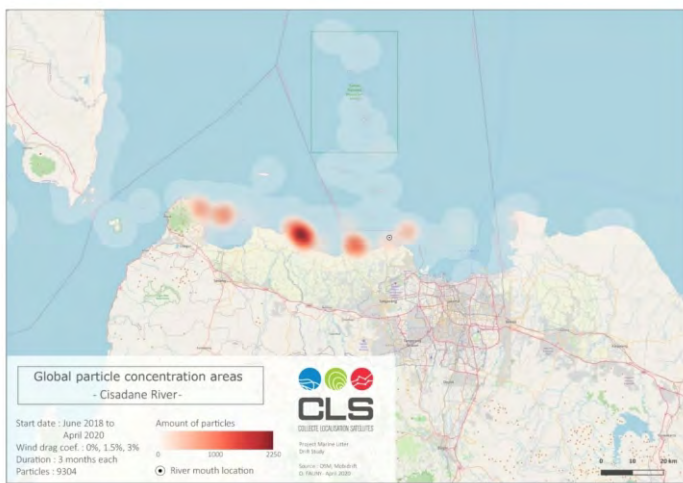
Kedua, sungai-sungai besar menjadi sumber utama sampah plastik laut.

Suatu studi yang dilakukan antara tahun 2018 hingga 2020 berhasil melacak zona akhir timbulan partikel plastik yang berasal dari tiga sungai besar di Indonesia yang menjadi sumber terbanyak (*hotspot*) sampah plastik. Di Sungai Cisadane dan Sungai

Musi, 65 persen timbulan sampah plastik ditemukan di dekat muara sungai. Sementara itu, 90 persen partikel sampah plastik yang berasal dari Sungai Solo tersebar luas di perairan Indonesia atau terbawa lebih jauh hingga Samudera Hindia.

Ketiga, plastik sekali pakai adalah jenis plastik yang paling banyak ditemukan di sungai-sungai besar dan di pantai.

Dengan menggunakan *drone* dan *artificial intelligence* untuk mendeteksi dan menghitung sampah plastik laut yang mengambang dan/atau tersapu ke pantai, hasil studi lainnya menunjukkan bahwa setidaknya separuh (47 - 65 persen) dari jumlah total plastik yang ditemukan di tepi sungai adalah plastik sekali pakai, seperti tutup gelas, tutup botol, dan benda-benda kecil yang terbuat dari plastik.



Peta-peta yang menunjukkan titik-titik timbulan sampah plastik berdasarkan simulasi pergerakan partikel yang dilakukan pada bulan Juni 2018 - Maret 2020. Titik-titik merah di peta menunjukkan zona timbulan sampah plastik dan intensitas titik-titik mencerminkan jumlah partikel.

Sumber: **CLS Argos Indonesia**

Walaupun temuan tersebut mungkin tidak mewakili kondisi di seluruh Indonesia mengingat bahwa sampel hanya mencakup tiga sungai (Cisadane, Citarum, dan Bali), hasil temuan tersebut mendukung argumen bahwa menghindari penggunaan plastik sekali pakai secara bertahap kemungkinan dapat mengurangi volume sampah plastik yang dibuang ke lingkungan laut Indonesia. Temuan ini juga sesuai dengan hasil studi lainnya, termasuk studi sampah laut makro ter-bengkalai berskala nasional yang menemukan bahwa plastik sekali pakai merupakan sampah laut mikroplastik terbanyak yang dijumpai di 18 pantai di Indonesia.

Bagaimana Indonesia dapat menghentikan aliran sampah plastik ke lautnya? Studi tersebut merekomendasikan tiga aksi kebijakan.

Pertama, menerapkan pengelolaan sampah plastik di sektor perikanan Indonesia dengan membentuk lembaga dan dana khusus untuk pengelolaan ALDFG dan EOLFG, serta mendukung ekonomi sirkular dengan instrumen yang dapat mendorong produsen untuk lebih bertanggung jawab atas alat penangkapan ikan yang sudah tidak terpakai, seperti skema pembelian kembali alat penangkapan ikan untuk mendapatkan alat penangkapan ikan yang baru dengan harga diskon dan skema pengembalian uang jaminan (*deposit-refund*). Bank Dunia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menjajaki kerja sama untuk mencegah timbulan ALDFG, memitigasi dampak yang ditimbulkan oleh ALDFG dan EOLFG, serta mengumpulkan ALDFG dari habitat laut dan pesisir.

Kedua, memastikan bahwa sampah di daerah setempat dikelola secara tepat dengan meningkatkan cakupan pengumpulan sampah serta meningkatkan sistem informasi sampah yang ada untuk mencakup informasi tentang sampah yang dikumpulkan dan didaur ulang, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan, misalnya acara membersihkan pantai, khususnya selama musim kemarau



yang seringkali ditandai oleh banyaknya timbulan sampah plastik. Langkah ini dapat membantu mengurangi volume timbulan sampah di sepanjang bantaran sungai dan muara sungai yang kemudian berakhir di laut. Dukungan berkelanjutan yang diberikan oleh Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan sampah dapat membantu mengurangi volume sampah plastik yang memasuki perairan, pada akhirnya akan meningkatkan kondisi perairan Indonesia dan dunia.

Yang terakhir, menargetkan plastik sekali pakai melalui kebijakan yang membatasi dan menerapkan biaya retribusi untuk penggunaan plastik sekali pakai, khususnya apabila produk alternatif sudah tersedia. Pembatasan dan biaya retribusi akan mendorong diterapkannya pendekatan bertahap untuk mengurangi konsumsi plastik tanpa menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap perekonomian. Bersama dengan *National Plastic Action Partnership* dan Kemenko Marves, Bank Dunia telah menyiapkan peta jalan untuk mengurangi sampah plastik di sumber dengan (i) mempercepat upaya menuju bebas sampah plastik sekali pakai, (ii) menggunakan bahan alternatif sebagai pengganti plastik sekali pakai, dan (iii) meningkatkan efisiensi mekanisme yang menegakkan tanggung jawab produsen atas sampah yang mereka hasilkan.

Bank Dunia berkomitmen untuk menghasilkan analisis berkualitas tinggi guna mendukung dan

Sebuah kegiatan bersih pantai di Bali, Indonesia.
Foto: [Unsplash/ocg.org](https://unsplash.com/photos/ocg.org)

memandu reformasi kebijakan, mengumpulkan investasi, dan menyediakan pembiayaan untuk mendukung Indonesia dalam memerangi pencemaran sampah plastik di laut. Program ini dilaksanakan di Indonesia dengan dukungan dari PROBLUE dan *Oceans, Marine Debris and Coastal Resources Multi-Donor Trust Fund* yang didukung oleh Norwegia dan Denmark dan resolusi *UN Environmental Assembly* di bulan Maret 2022, dengan tujuan untuk menciptakan instrumen yang mengikat secara hukum internasional untuk mengakhiri pencemaran sampah plastik agar biota laut dan ikan pari manta yang ditampilkan dalam video dapat berenang dengan bebas di laut biru yang bersih dan jernih.

Studi tentang sampah laut di Indonesia didukung oleh Bank Dunia melalui kerja sama dengan Poseidon/Hatfield, CLS-Indonesia, *German Research Center for Artificial Intelligence*/Institut Teknologi Bandung, dan *Environment Agency Austria* bersama dengan *Waste4Change*. Program Bank Dunia terkait sampah plastik laut di Indonesia didukung oleh PROBLUE dan *Oceans, Marine Debris and Coastal Resources Multi-Donor Trust Fund* yang didanai oleh Norwegia dan Denmark.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/how-indonesia-combating-marine-plastic-pollution-source-sea>



PENGENDALIAN NYAMUK ANOPHELES PENULAR MALARIA DI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh **INDRIYANI TAKESAN**

Salah satu dari tiga pilar dalam Strategi Global untuk Malaria Tahun 2016-2030 yaitu menjamin akses terhadap upaya pencegahan, diagnosis dan pengobatan malaria. Komponen yang perlu diperhatikan selain mengoptimalkan tata laksana kasus adalah meningkatkan upaya pengendalian vektor, dalam hal ini Nyamuk *Anopheles*.

Dalam *World Malaria Report 2022*, untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia berkontribusi paling banyak dalam kasus malaria yaitu 55%; kemudian India 29% dan Myanmar 14%.

Indonesia pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 443.530 kasus malaria. NTT berada



pada posisi kedua terbanyak dengan total 15.812 kasus. Sementara, update hingga minggu terakhir September 2023, jumlah kasus malaria di NTT berjumlah 5.300 kasus dan tercatat 3 kasus kematian dengan malaria dari tiga kabupaten yaitu Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Sikka.

Tiga wilayah kabupaten di Pulau Sumba tercatat sebagai wilayah endemis tinggi malaria sejak tahun 2018 yakni Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Sementara Sumba Tengah, dari endemis tinggi menjadi wilayah endemis sedang pada tahun 2019.

Pergeseran status endemisitas berdasarkan API (*Annual Parasite Incidence*) atau jumlah kasus

Indonesia pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 443.530 kasus malaria. NTT berada pada posisi kedua terbanyak dengan total 15.812 kasus. Sementara, update hingga minggu terakhir September 2023, jumlah kasus malaria di NTT berjumlah 5.300 kasus dan tercatat 3 kasus kematian dengan malaria dari tiga kabupaten yaitu Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Sikka.

malaria di antara 1000 penduduk per tahun. Kota Kupang dan enam kabupaten di daratan Pulau Flores telah mendapat sertifikat wilayah eliminasi malaria atau tidak ada lagi penularan lokal malaria. Pada tahun 2022, enam kabupaten yaitu Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sikka, Timor Tengah Selatan dan Malaka tercatat sebagai wilayah dengan endemis sedang malaria padahal pada tahun 2021, keenam kabupaten tersebut masih berstatus wilayah endemis rendah. Hal ini dikarenakan ada peningkatan penemuan kasus malaria di enam wilayah tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan ada peningkatan upaya penemuan kasus sehingga upaya pengendalian vektor pun perlu digencarkan lagi di semua wilayah di NTT bukan hanya berfokus pada wilayah eliminasi saja.

Penularan Malaria

Parasit *plasmodium* yang menyebabkan penyakit malaria ada lima macam, yaitu *Plasmodium falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* dan *P. knowlesi*. Parasit yang paling banyak ditemukan di NTT yaitu *P. falciparum* dan *P. vivax*. Sedangkan *P. knowlesi* atau yang ditularkan melalui kera belum pernah ditemukan di wilayah NTT.

Parasit yang ada dalam tubuh orang yang sakit malaria akan terhisap oleh Nyamuk *Anopheles* saat



menggigit. Parasit tersebut berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Setelah 7-14 hari nyamuk tersebut dapat menggigit orang sehat dan menularkan parasit sehingga dalam tubuh orang itu, parasit berkembang biak dan mulai menyerang sel-sel darah merah dan akhirnya kurang lebih 12 hari muncul gejala malaria.

Mata rantai penularan dapat diputuskan dengan mencegah nyamuk menggigit manusia, misalnya menggunakan kelambu dan juga dengan mengurangi populasi nyamuk *Anopheles* misalnya dengan IRS.

Kelambu Anti Nyamuk

Peraturan Gubernur NTT No.124 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan salah satu upaya pencegahan malaria adalah dengan pemakaian kelambu anti nyamuk.

Pada akhir tahun 2022, Pemerintah NTT melalui Dinas Kesehatan telah menyalurkan kelambu anti nyamuk ke 9 kabupaten, yaitu Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Alor, Belu, Malaka dan Timor Tengah Selatan.

Hingga September 2023 ini, tercatat sudah 99.9% capaian distribusi kelambu di NTT. Petugas dari Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten serta puskesmas yang warga di wilayahnya mendapat kelambu, memantau pemakaian kelambu dengan rumus 1-1-3 atau Monev Kelambu 1-1-3. Monev Kelambu 1-1-3 dilaksanakan pada minggu pertama, bulan pertama dan bulan ketiga pasca distribusi ke masyarakat.



(Kiri) Rumah warga miskin yang menggunakan kelambu untuk melindungi anggota keluarga mereka dari malaria. Hingga September 2023 sudah 99,9% capaian distribusi kelambu di NTT. (Kiri bawah) Kerjasama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga lingkungan agar bebas dari malaria. (Kanan) Anggota tim penyemprotan. Tim ini beranggoakan petugas puskesmas dan warga desa yang menjadi kader malaria.

Foto: **Dok. Penulis**

Upaya percepatan eliminasi malaria tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola malaria di puskesmas. Kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga lingkungan agar bebas dari penyakit. Peran pemerintah desa hingga ke tingkat dusun sangat berarti. Kebijakan pemerintah desa dan pembentukan kader malaria desa dengan pendampingan dari Perdhaki cukup membuktikan bahwa kerja sama yang baik dapat meningkatkan penemuan kasus dan menjamin tuntasnya pengobatan kasus malaria. Kader malaria desa juga turut memantau pemakaian kelambu.

Masa efektif kelambu anti nyamuk adalah 3 tahun. Kelambu dibagikan berdasarkan jumlah kelompok tidur. Kelompok tidur terbagi menjadi kelompok dalam rumah dan luar rumah seperti rumah kebun atau rumah sawah.

Indoor Residual Spraying (IRS)

Selain kelambu, penyemprotan dinding dalam rumah atau dikenal dengan IRS juga dilakukan di beberapa lokasi/desa di wilayah endemis tinggi dan sedang. Sepuluh orang dipilih untuk bergabung dalam Tim Penyemprotan. Mereka adalah petugas puskesmas dan kader malaria atau warga desa.

Tim penyemprot dibekali dengan keterampilan dan Alat Pelindung Diri (APD) sebelum turun ke desa untuk melakukan penyemprotan di rumah-rumah.

Perjalanan menuju ke lokasi penyemprotan di wilayah sulit masih ada yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor. Sedangkan beberapa rumah harus dijangkau dengan berjalan kaki.

Setelah melewati perjalanan berbukit-bukit dan menyeberangi sungai-sungai kecil, para penyemprot langsung beraksi dari rumah ke rumah. Pemerintah

desa dan dusun telah menginformasikan kepada warga untuk mempersiapkan rumah mereka beberapa hari sebelumnya.

Rumah tradisional, semi permanen maupun rumah permanen disemprot dindingnya dengan tujuan untuk mengurangi populasi nyamuk penular malaria.

Cara Lain Mengendalikan Nyamuk *Anopheles*

Pemakaian kelambu dan IRS merupakan kegiatan memutus rantai penularan pada nyamuk dewasa. Sedangkan kegiatan untuk memberantas jentik nyamuk *Anopheles* dapat dilakukan dengan cara modifikasi lingkungan seperti menutup genangan air pada bekas jejak kaki hewan dengan tanah, membuat saluran air agar air mengalir atau membuat saluran air tawar ke air laut, memelihara ikan kepala timah di tempat air tergenang. Cara kimiawi dapat dilakukan apabila cara alami seperti modifikasi lingkungan tidak memungkinkan untuk dilakukan, misalnya dengan menyemprot larvasida ke tempat perindukan nyamuk seperti rawa-rawa menggunakan *mistblower*.

Dalam upaya percepatan menuju eliminasi malaria di NTT tahun 2028, kekompakan petugas kesehatan bersama aparat desa/kelurahan dengan masyarakat dan sektor terkait sangat dibutuhkan. Strategi yang tepat perlu diaplikasikan bersama untuk mengendalikan nyamuk *Anopheles* dalam lingkup wilayah kerja kecamatan hingga ke dusun. Tidak terlepas dari pengendalian nyamuk, pengobatan yang tuntas merupakan kunci keberhasilan agar tidak ada lagi parasit dalam tubuh manusia yang dapat ditularkan ke manusia lain melalui nyamuk ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah ME Junior pada GF ATM-Komponen Malaria Provinsi NTT dan dapat dihubungi melalui email: inriyanitakesan@gmail.com



CERITA PENJAGA HUTAN DI SUMBA TIMUR: HIDUP KAMI BERGANTUNG PADA ALAM

Oleh **AURELIA GRACIA**

Masih lekat di ingatan, banjir bandang dan Badai Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT), April 2022. Peristiwa yang termasuk paling parah sejak 2011 itu dipicu siklon tropis Seroja. Siklon tersebut menyebabkan intensitas hujan yang lebat dan ekstrem, bahkan sampai menimbulkan tanah longsor dan angin kencang.

Akibatnya, bencana ini merenggut 138 nyawa warga, 61 orang dinyatakan hilang, dan kerusakan di 52.793 rumah pada 17 kabupaten dan kota. Kendati demikian, di tengah daerah lainnya di NTT yang kebanjiran, Kampung Kuya yang terletak di Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Sumba Timur, justru tidak mengalaminya. Kerusakan yang dialami adalah dampak dari badai Seroja.

“Itu berkat mangrove di dusun kami,” ujar Kepala Dusun Kampung Kuya, Zedrah Yohanes, kepada Magdalene (10/9).

Di pekarangan rumahnya pagi itu, Zedrah menceritakan bagaimana kondisi dusunnya saat peristiwa itu terjadi. Awalnya hujan lebat tiga hari, berlanjut dengan angin kencang selama tujuh jam.

Kondisi itu membuat aktivitas mereka terhambat. Tak sedikit pohon yang tumbang, hingga 126 rumah mengalami kerusakan. Warga tidak dapat melakukan apa pun selain berlindung. Ditambah terputusnya komunikasi, dan listrik yang padam selama 42 hari sehingga mereka memanfaatkan lilin dan genset.

“Tapi di sini kering (kami enggak kebanjiran),” ceritanya.

Zedrah mengaku, mangrove berperan besar dalam situasi tersebut, meskipun dusunnya sangat berdekatan dengan laut. Tanaman itu menahan arus air laut yang mengikis dataran pantai, menyelamatkan Kampung Kuya dari banjir dan abrasi.

Pun, dusunnya merupakan satu-satunya yang masih menjaga hutan mangrove, di antara lainnya yang telah memangkas habis dan memanfaatkan lahan untuk memperluas tembok rumah. Akibatnya, dusun lain ikut terdampak banjir dalam peristiwa tersebut.

Kerusakan akibat ulah manusia tidak hanya dialami oleh warga dusun di sekitar Kampung Kuya, tetapi juga Desa Mburukulu, Kecamatan Pahunga Lodu, Sumba Timur.

Sejak 2015, mereka terhambat untuk mengakses air. Ini merupakan dampak dari penebangan hutan oleh warga di Desa Lambakara dan Desa Palanggay, Sumba Timur, yang dilakukan secara liar. Mereka kemudian menjual kayu-kayu tersebut. Sementara perusahaan swasta membutuhkan tanah untuk pembukaan perkebunan tebu.

“Bisnis penjualan kayu itu dinilai menggiurkan. Soalnya kayu yang dijual punya nilai tinggi, jadi bisa menambah perekonomian,” tutur Rambu Ana Maeri, pendeta di Desa Mburukulu yang ikut melestarikan lingkungan hidup.

“Satu kubik kayu harganya sekitar tiga juta rupiah. Orang bisa membeli sekian kubik, dan kayunya memang bagus,” tambah Rambu Ana.

Di tengah situasi itu, warga Desa Mburukulu tidak memberikan izin atas penjualan lahan ke perusahaan. Sebab, lahan itu akan semakin sempit untuk hewan ternak dan masa depan anak-anaknya. Mereka juga sangat bergantung pada mata air dari Desa Lambakara, untuk irigasi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keterbatasan akses terhadap aliran air sempat menyebabkan kekeringan dan gagal panen di sawah-sawah Desa Mburukulu. Bahkan, untuk mandi saja mereka harus berjalan sejauh 8 kilometer, ke ledeng yang sumbernya berasal dari mata air Kawuku. Kemudian menampungnya dalam jerigen-jerigen.

“Jadinya kami memanfaatkan sumber mata air dari Desa Lambakara, tapi sistem pengairan sawah itu harus gantian,” tutur Rambu Ana. “Misalnya hari ini lima petak pertama punya A, besok baru sawahnya B,” imbuhnya.

Padahal, sebelum penebangan terjadi, Desa Mburukulu dapat memanfaatkan mata airnya sendiri, yaitu Matawai La Wangga. Sayangnya, mata air itu telah ditutup perusahaan. Sementara debit air dari mata air di Desa Palanggay semakin mengecil.

Belum lagi burung yang berpindah ke sawah dan menjadi hama bagi penanaman padi. Situasi ini menandakan rusaknya tempat tinggal mereka yang seharusnya di hutan, dan berdampak pada ekosistem sawah.

Penebangan hutan dampaknya bukan hanya berpengaruh terhadap proses dan hasil bertani, tapi juga sumber dayanya. Pasalnya, mata pencaharian utama warga Desa Mburukulu adalah berkebun dan bertani. Situasi tersebut sempat membuat mereka harus diliburkan dari pekerjaannya.

“Mereka beralih untuk mengelola rumput laut dan mengurus kebun jambu mete,” kata Rambu Ana.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Mburukulu tak luput dari peran pemerintah, dan perusahaan swasta yang memutuskan untuk membuka lahan tebu. Pada akhirnya, warga yang mengalami akibatnya dan harus berjuang untuk memperbaiki lingkungan.

Namun, berdasarkan penuturan Rambu Ana, sejumlah warga di desa ini belum cukup memiliki kesadaran dan terlibat dalam perawatan lingkungan. Mereka justru memandang sebelah mata, usaha perempuan 45 tahun itu untuk memperbaiki tempat tinggalnya.

Peran Masyarakat dalam Ketahanan dari Bencana

Sebagai seorang pendeta, Rambu Ana memanfaatkan hak istimewanya untuk mengajak jemaatnya menjaga lingkungan. Hal itu disampaikan melalui khotbah ketika sedang melangsungkan ibadah, atau mengobrol dengan mereka saat pelayanan. Menurutnya, para jemaat belum memiliki kesadaran merawat lingkungan. Bahkan, penanaman pohon dilakukan hanya karena memiliki fungsi ekonomi.

“Mereka belum punya pemahaman kalau menanam (pohon) bisa menyelamatkan lingkungan. Jadi mereka menanam untuk kebutuhannya nanti ketika mau bangun rumah misalnya,” tutur Rambu Ana.

Jemaat pun belum memedulikan penebangan hutan yang dilakukan. Ada anggapan perbuatan tersebut bukan urusannya. Kata Rambu Ana, keprihatinan mereka juga hanya sebatas ungkapan tanpa sebuah aksi.

“Paling cuma bilang, ‘Kasihannya sudah habis’, tapi belum ada upaya untuk menanam kembali,” ceritanya.

Tanggapan tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman mereka yang belum melihat suatu permasalahan untuk jangka panjang. Mereka masih fokus pada apa yang terlihat di depan mata.

Sementara, advokasi yang dilakukan Rambu Ana bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang semakin terjadi. Ia juga memikirkan anak cucu yang kemungkinan tidak dapat menikmati alam, dan menjadi “penonton” di tanahnya sendiri lantaran sudah tidak memiliki lahan.

“Kadang saya mengaitkan juga dengan firman untuk menjaga lingkungan. Kalau manusia diciptakan bukan berkuasa atas semuanya, tapi dititipkan untuk merawat alam,” ucap Rambu Ana.

Sayangnya, upaya untuk menyuarkan isu yang menjadi keprihatinannya masih sering tak diacuhkan oleh jemaatnya. Mereka sekadar mendengarkan khotbah Rambu Ana, tapi tidak diwujudkan lewat aksi dalam hidup sehari-hari.

“Kenapa kamu enggak mengurus khotbah dan melakukan pelayanan, aja? Kenapa harus berurusan dengan masalah ini?” tutur Rambu Ana, meniru ungkapan yang disampaikan jemaatnya yang kontra.

“Bahkan mereka bilang, ‘Memangnya berapa rupiah yang gereja kasih untuk jemaat?’” sambungnya.

Namun, hal itu tidak mengurungkan niat Rambu Ana dalam menyuarkan pentingnya menjaga hutan kepada jemaatnya. Bersama sebagian jemaat yang lebih sadar untuk merawat alam, mereka melakukan reboisasi berupa pohon mahoni di halaman rumah masing-masing.

“Memang belum luas, tapi kami menanam semampunya,” ujar Rambu Ana. “Sebenarnya mereka juga masih melihat penanaman ini untuk memenuhi kebutuhan kami saat membangun rumah, tapi enggak apa-apa. Setidaknya sudah membantu menyelamatkan (lingkungan) walaupun sedikit.”

Situasi di Desa Mburukulu berbeda dengan Kampung Kuya. Pasca terjadinya badai Seroja, dengan perlahan warga kampung tersebut memiliki

kesadaran untuk lebih banyak menanam dan tidak menebang mangrove.

Sementara sebelum bencana itu menyapu NTT, sejumlah warga kerap melakukan pemangkasan. Bahkan, penanaman yang dilakukan Zedrahk bersama 20 orang warga lainnya dilakukan tanpa tujuan.

“Pada 2013 itu kami menanam tanpa tahu fungsinya seperti apa,” ungkap Zedrahk. “Paling ya pas gelombang pasang enggak langsung (mengarah) ke rumah karena ditahan mangrove.”

Pasalnya, pada 1996, lahan yang kini menjadi hutan mangrove itu sempat dipangkas habis. Kemudian, dijual untuk proyek tambak ikan milik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Setelah terjadi abrasi, barulah bakau tumbuh dengan sendirinya.

Kendati demikian, abrasi yang menumbuhkan bakau itu tidak serta-merta membangun kesadaran warga. Pun Zedrahk mengaku, ia menanam mangrove hanya karena iseng. Kebetulan mendapati buah-buah mangrove yang berjatuhan, ketika bekerja di pesisir pantai sebagai nelayan.

Namun, setelah badai Seroja, barulah ia mulai mendekati warga satu per satu untuk mengajak menanam mangrove. Zedrahk mengaku hal itu sulit dilakukan, lantaran warga yang masih berprinsip akan mengerjakan sesuatu hanya jika memiliki nilai ekonomi.

“Saya dan kepala desa bilang, jaga mangrove ini seperti milik pribadi. Nanti kalau punah, akan berdampak banjir. Mau enggak kayak begitu?” kata Zedrahk, mengingat upayanya membangun kesadaran warga Kampung Kuya.

Meskipun belum semua warga ikut membudidayakan, mereka yang belum berpartisipasi tetap terlibat dalam menjaga hutan mangrove. Warga Kampung Kuya sepakat untuk tidak memangkas, dan melakukan pemantauan sebanyak dua sampai tiga kali per tahunnya.

“Pemantauan itu buat menjaga, jangan sampai ada yang memotong,” terang Zedrahk. “Kami juga nggak mengizinkan siapa pun mengambil kayu kering. Takutnya nanti juga kayu yang masih hidup ikut dipangkas.”

Apabila kayu mangrove dibutuhkan warga-misalnya untuk membuat pondok-mereka hanya mengambil satu sampai dua batang dari satu rumpun pohon. Lebih dari itu, untuk menjaga mangrove, warga Kampung Kuya juga mem-berlakukan sanksi adat bagi yang melanggar.

“Contohnya harus membayar sejumlah uang, atau dengan hewan ternak seperti babi,” jelas Zedra. Berkat konservasi yang dilakukan, kini warga Kampung Kuya memiliki hutan mangrove seluas empat hektar.

Hutan Sebagai Ketahanan Pangan

Selain ketahanan bencana, bagi sebagian orang, hutan juga memiliki fungsi sebagai ketahanan pangan. Mereka memanfaatkan hasil hutan untuk makanan yang dikonsumsi sehari-hari, sekaligus obat-obatan.

Hal itu dilakukan oleh Apu Hana, petani perempuan yang menetap di hutan adat Kawata. Ia memanfaatkan jagung dan umbi-umbian di kebun ataupun hutan untuk kebutuhan pangan.

“Ada dua macam ubi yang diambil, saat musim kemarau dan hujan. Kalau musim hujan itu tingkat racunnya lebih tinggi karena basah,” kata Apu Hana saat ditemui di kediamannya.

Di masa paceklik, ubi dipanen sesuai kebutuhan dan tidak bisa disimpan dalam waktu lama karena bisa merusak kualitasnya. Untuk pengolahannya, Apu Hana akan mengupas, mengiris tipis, dan merendamnya di air. Kemudian, dibentuk seperti bola dan kembali dijemur untuk siap digoreng, atau ditumbuk menjadi tepung.

“Kalau ubi yang dipanen pas musim hujan, proses masakannya lama. Mengirisnya juga harus lebih tipis dan dicuci dengan garam, buat menetralkan racun,” tambahnya.

Selain ubi, Apu Hana juga mengonsumsi batang pohon kari sebagai sayur. Sementara untuk obat-obatan, ibu empat anak itu memanfaatkan sejumlah tanaman untuk mengatasi sakit. Mulai dari luka hingga penyakit dalam.

“Ada namanya tanaman kapalia, itu untuk menolong persalinan dan penyakit dalam. Terus katamba, yang dimanfaatkan daun dan akarnya untuk mengobati asma dan sesak napas,” ujarnya, memberikan beberapa contoh.

Daun dari tanaman-tanaman itu direbus dan airnya diminum, atau dipakai untuk mandi. Pun baginya, mencari tanaman di sekitarnya akan lebih cepat untuk mengobati penyakit, dibandingkan pergi ke apotik maupun rumah sakit.

Dari ceritanya, terlihat bagaimana Apu Hana mengandalkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, ia tidak bergantung pada nilai ekonomi yang sebenarnya bisa dihasilkan,

dengan menjual hasil panen. Menurut Apu Hana, hidupnya selama ini telah berkecukupan, yang didefinisikannya sebagai tidak kekurangan makanan.

Sebenarnya, peran Apu Hana di hutan adat Kawata bukan sekadar “menumpang” tempat tinggal. Di tengah aktivitasnya berkebun, menggembala kerbau, dan menjaga cucu di rumah, ia memiliki peran yang signifikan dalam menjaga hutan.

“Nggak boleh ada yang masuk ke hutan ini, selain mengambil kayu untuk bikin rumah adat,” katanya. Pasalnya, ada sejumlah orang yang berusaha masuk untuk menyensor kayu secara ilegal. Mereka menganggap hutan tersebut sebagai lahan kosong yang bisa dijadikan perkebunan.

“Kalau hal yang seperti itu terjadi, saya langsung lapor ke pemerintah desa. Nanti mereka yang langsung datang untuk melarang orang-orang yang mau masuk ke hutan,” jelas Apu Hana.

Akibat kehadiran para pendatang, Apu Hana tidak lagi berkebun di pinggir hutan. Ia khawatir, orang-orang itu akan ikut berkegiatan yang sama di sana. Kini Apu Hana melakukan aktivitasnya di tempat yang agak jauh ke dalam hutan. Sebab, lahan itu merupakan peninggalan turun-temurun dari keluarganya, sehingga tidak dapat dikuasai orang lain. Ibaratnya, Apu Hana telah digariskan sebagai penjaga kebun dan hutan adat Kawata.

Hal itu juga menjadi salah satu alasan ia tidak pindah ke daerah yang dapat lebih diakses. “Saya juga takut susah beradaptasi kalau pindah ke tempat baru. Kalau di sini kan udah tahu cara mengatasi kesulitan. Kalau enggak ada makanan dari kebun, bisa pergi ke hutan,” terang Apu Hana.

Selama kurang lebih 50 tahun tinggal di hutan adat Kawata, Apu Hana mengaku tidak pernah mengalami kesulitan. Pun, tantangannya hanya ketika ada pendatang yang ingin masuk ke hutan dan ikut berkebun. Ini menunjukkan betapa berharganya hutan dan lingkungan bagi Apu Hana. Ia juga mengatakan, tidak akan membiarkan orang-orang menyensor kayu ataupun membakar hutan.

“Seandainya hutan ini rusak, saya akan sangat sakit hati karena tidak akan ada yang menyusui hujan,” tegasnya. “Kalau hutan itu tidak ada, maka hujan juga tidak akan ada.”

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://magdalene.co/story/cerita-perempuan-penjaga-hutan-dari-sumba-timur/>



MENCARI ALASAN MENGAPA ORANG INDONESIA RELA MENJUAL SUARA DI PEMILU?

Oleh **ANHAR DANA PUTRA**

Tiga dari setiap 10 orang Indonesia yang pernah berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilu, pernah terlibat transaksi politik uang. Kenapa?

Praktik politik uang atau klientelisme masih menjadi parasit yang menggerogoti kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia sampai saat ini.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada awal tahun 2023 menemukan bahwa 36,5 persen dari 506 orang responden nasional mengaku pernah menerima uang atau melihat orang lain menerima uang dari para peserta pemilihan umum (pemilu). Artinya, 3 dari setiap 10 orang Indonesia yang pernah berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilu, pernah terlibat dalam transaksi politik uang.

Angka ini cukup mengkhawatirkan jika tidak diatasi segera secara menyeluruh, utamanya menjelang Pemilu 2024. Sayangnya, pemahaman masyarakat dan para aktor politik terkait persoalan klientelisme di Indonesia masih belum sepenuhnya utuh, sehingga segala upaya pencegahan yang sudah dilakukan, misalnya sosialisasi dan kampanye anti politik uang yang umumnya dilakukan oleh Bawaslu, belum benar-benar membuahkan hasil.

Mayoritas studi terkait politik uang masih cenderung berkutat pada perilaku *vote-buying* (menawarkan uang untuk membeli suara), sementara studi yang menyorot aspek psikologis yang mendorong perilaku *vote-selling* (menerima uang untuk menjual suara) masih sangat terbatas.

Padahal kedua aktor tersebut memberi kontribusi yang sama-sama signifikan dalam menciptakan praktik klientelisme. Politik uang tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada masyarakat yang ingin menerima uang, sekali pun ada politikus yang menawarkan.

Secara psikologis, faktor apa saja yang membuat masyarakat tidak bisa menghindari diri dari perilaku *vote-selling*? Penting untuk menemukan akar penyebabnya jika ingin membasmi politik uang secara menyeluruh.

Mengapa Orang Mau Menjual Suaranya?

Akademisi ilmu politik Burhanuddin Muhtadi, dalam bukunya “Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru”, mengungkapkan bahwa pendapatan, status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam transaksi klientelisme.

Penyebab utamanya justru karena adanya normalisasi yang dilakukan masyarakat terhadap praktik tersebut. Ini membuat mereka jadi permisif.

Selain itu, masih banyak komunitas masyarakat yang memandang tindakan klientelisme sebagai gestur kebaikan hati, bahkan religius (misalnya menganggapnya sebagai sedekah). Ini membuat mereka meyakini bahwa praktik tersebut adalah suatu tindakan yang luhur, sehingga mereka malah mendukungnya.

Sebuah studi terkait perilaku *vote-selling* oleh Rizka Halida, seorang pakar psikologi sosial asal Universitas Indonesia, bersama tiga orang rekan penelitiannya pada tahun 2022 menemukan bahwa jumlah nominal uang yang ditawarkan dapat memengaruhi keputusan *vote-seller* untuk menerima uang atau tidak. Namun, hal ini hanya berlaku jika *vote-seller* memiliki *inhibitory self-control* yang rendah. *Inhibitory self-control* bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menahan hasrat untuk melakukan perilaku-perilaku impulsif yang berisiko, membahayakan atau melanggar aturan.

Ketika seseorang memiliki *inhibitory self-control* yang tinggi, ia akan mampu memproses secara kognitif bahwa menerima uang dari *vote-buyer* sama halnya dengan berpartisipasi dalam transaksi yang ilegal dan tidak etis. Kesadaran ini akan mendorong mereka untuk menghindarinya.

Faktor psikologis lain yang bisa memengaruhi keputusan *vote-seller* untuk menerima uang dari *vote-buyer* adalah sesuatu yang disebut “bias rabun jauh” (*present bias*). Sebuah konsep yang populer dalam bidang ilmu perilaku dan psikologi sosial.

Bias rabun jauh merupakan kecenderungan alami manusia untuk lebih memilih hadiah (*reward*) yang bisa diperoleh saat ini, walaupun nilainya kecil, ketimbang hadiah yang lebih besar tapi hanya bisa diperoleh di masa depan. Sebagai ilustrasi, bias inilah yang menyebabkan mengapa kita lebih senang membelanjakan gaji yang baru saja kita terima untuk membeli *gadget* baru, ketimbang menabung untuk keperluan masa depan. Ini karena hadiah dari menabung baru bisa diperoleh atau dinikmati nanti, bukan saat ini juga.

Kerentanan manusia terhadap bias rabun jauh memungkinkan mereka tergiur untuk menerima tawaran uang yang bisa mereka dapat langsung saat ini dan menjual suaranya dalam pemilu, walaupun tidak seberapa. Lalu mereka mengabaikan kepentingannya untuk memperoleh pemerintahan yang bersih serta kebijakan-kebijakan yang adil dan mensejahterakan di masa mendatang.

Bias ini memungkinkan masyarakat menderita semacam “miopi politik” (rabun jauh dalam politik) yang menyebabkan mereka gagal melihat lebih jauh ke depan dan cenderung mengambil keputusan politik dengan visibilitas jangka pendek.

Bagaimana Menghindarinya?

Pendidikan literasi politik pada masyarakat masih menjadi strategi yang wajib terus diupayakan untuk mengurangi praktik politik uang dalam jangka panjang. Pendidikan literasi juga perlu melibatkan semua elemen pemerintah daerah, pemerintah desa, penyelenggara pemilu, maupun LSM. Seperti pendidikan literasi berbasis desa yang telah dilakukan oleh 34 desa di Daerah Istimewa Yogyakarta bernama Gerakan Desa Anti-Politik Uang yang memberikan sanksi sosial bagi para pelaku suap.

Pendidikan literasi politik diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan integritas politik masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan *inhibitory self-control* mereka.

Selain itu, perlu strategi khusus untuk terus membuat manfaat jangka panjang dari pelaksana-

an pemilu yang bersih terlihat menonjol dalam setiap kampanye politik, agar masyarakat dapat menyadari secara riil manfaat yang bisa mereka peroleh jika mereka menolak politik uang. Sebab, hanya dengan begitu masyarakat dapat terbebas dari bias rabun jauh dan miopi politik yang mereka derita.

Sebuah studi eksperimen yang dilakukan oleh Allen Hicken, seorang profesor ilmu politik dari University of Michigan, di Filipina pada 2013 juga dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan strategi yang efektif dalam mendorong masyarakat menghindari perilaku *vote-selling*.

Eksperimen tersebut dilakukan terhadap 900 orang pemilih yang dibagi ke dalam tiga kelompok secara acak: (1) kelompok yang diminta untuk menyaksikan video pendek berisi ajakan untuk berpartisipasi dalam pemilu kemudian diminta berjanji tidak akan menerima uang untuk menjual suaranya; (2) kelompok yang diminta untuk menyaksikan video pendek kemudian diminta untuk memilih dengan hati nurani sekali pun tetap menerima uang; dan (3) kelompok yang hanya diminta untuk menyaksikan video.

Hasil eksperimen tersebut menunjukkan adanya penurunan potensi terjadinya perilaku *vote-selling* sebesar 11% pada responden dalam kelompok pertama. Temuan ini dapat menjadi inspirasi bahwa intervensi sederhana (seperti meminta pemilih berjanji untuk tidak menjual suara mereka dalam pemilu) dapat diterapkan sebagai strategi untuk mengurangi perilaku *vote-selling* dalam pemilu di Indonesia.

Pada dasarnya hampir semua strategi yang memungkinkan patut dicoba guna mengatasi persoalan klientelisme secara menyeluruh. Lebih bagus lagi jika ini dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mewujudkan pemilu yang paling tidak, setingkat lebih bersih pada 2024 mendatang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari:

<https://magdalene.co/story/vote-selling-pemilu>



DISKUSI ONLINE

Instagram Story @infobakti



Mendekatkan Anak Muda dengan Pertanian

Dominasi petani usia tua di Indonesia membuat urgensi regenerasi petani semakin kuat. Salah satu penyebabnya karena minat bertani generasi muda semakin menurun.

Apa yang dapat dilakukan untuk menarik minat anak muda kembali bertani? Kunjungi Instagram@infobakti, Sekolah Rakyat Payopayo berbagi pengalaman bagaimana *Maros Youth Learning Center* mempersiapkan anak muda menjadi petani yang berdaulat dari hulu ke hilir.

Selengkapnya kunjungi <https://www.youtube.com/@YayasanBaKTI/>

Podcast BASUARA



Perempuan Bantu Perempuan Akhiri Poverty Period

Berdasarkan data dari UNICEF, satu dari sepuluh perempuan kehilangan waktu mereka disekolah yang berjumlah sekitar 20% dari tahun ajaran oleh karena menstruasi mereka. Data ini menunjukkan masih banyak perempuan yang terdampak period poverty atau kemiskinan menstruasi? Apa itu kemiskinan menstruasi dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mengakhirinya?

Di Podcast Basuara (BaKTI Pu Suara) menghadirkan Westiani Agustin (Pendiri dan Direktur Biyung). Biyung Indonesia adalah organisasi dan usaha sosial yang didirikan untuk mendorong dan memperkuat perempuan dan individu dalam mencapai kesejahteraan bersama dan kelestarian lingkungan. Salah satu fokus Biyung Indonesia adalah membuka ruang aman bagi semua individu untuk mengakses hak menstruasi sehat.

Podcast **BASUARA (BaKTI Pu Suara)** adalah tempat berbagai cerita yang memberi inspirasi, memperkaya pengetahuan dari beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendorong meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.

Kunjungi Podcast Basuara melalui <http://bit.ly/basuara>

Artikel

Malgamasi Perguruan Tinggi Indonesia

Perguruan tinggi (PT) Indonesia ditantang untuk dapat memberi kontribusi nyata bagi pembangunan di daerah dan juga kemajuan bangsa. Amalgamasi atau penggabungan PT-PT diharapkan dapat meningkatkan peringkat PT Indonesia.

Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD per tahun seolah memberi semangat dan harapan baru peningkatan mutu kualitas pendidikan di Indonesia, disamping peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagai konstituen utama dunia pendidikan. Ada lebih dari 125 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 2.982 perguruan tinggi swasta (PTS) dalam bentuk politeknik, sekolah tinggi, institut ataupun universitas.

Di sisi lain, sebuah realitas yang perlu dikritisi, lulusan PTN/PTS belum mampu menjawab kebutuhan nasional sebagai tenaga kerja siap pakai guna mengisi pembangunan di republik ini. Bahkan kurikulum juga dipertanyakan mengingat hanya kurang dari 30 persen lulusan bekerja sesuai dengan bidang studinya.

- <https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/amalgamasi-perguruan-tinggi-indonesia>

Publikasi Terbaru



Mengenal Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia

Saat ini, banyak pihak menyadari bahwa kaum muda adalah pemegang kunci masa depan yang berkelanjutan, karena mereka akan mewarisi konsekuensi dari tindakan kita saat ini.

Peran mereka dalam mengatasi tantangan iklim dan lingkungan hidup sangat penting, dan merupakan tugas pemerintah, organisasi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa mereka memiliki suara yang berarti dalam membentuk kebijakan dan pengambilan keputusan.

Penting untuk ditekankan bahwa mendukung dan melindungi keterlibatan sipil kaum mudaharus lebih dari sekadar tokenisme atau sentimen kosong dalam proposal program dan janji-janji kampanye. Keterlibatan kaum muda yang sejati membutuhkan komitmen untuk menciptakan ruang di mana kaum muda dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, menyuarakan keprihatinan mereka, dan menyumbangkan ide dan solusi.

- <https://www.batukarinfo.com/referensi/mengenal-keterlibatan-kaum-muda-dalam-isu-iklim-dan-lingkungan-hidup-di-indonesia>

Berita Terbaru

Peningkatan Kapasitas ASN, Babak Baru Pengelolaan Papua

Kebijakan otonomi khusus di Papua diharapkan berdampak lebih baik dibandingkan otsus periode sebelumnya. Kuncinya ada di kapasitas aparat sipil negara dalam perencanaan dan penganggaran. Otonomi khusus atau otsus yang berjalan pada 2001-2021 di Papua belum berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang baru pun lahir dengan harapan otsus jilid kedua bisa berdampak lebih baik. Agar aturan baru dipahami dan dilaksanakan dengan baik, peningkatan kapasitas aparat sipil negara juga dibutuhkan.

Dua dekade lalu, negara menganggarkan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) untuk dana otsus di Tanah Papua. Dana ini untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP). Adapun otsus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

- <https://www.batukarinfo.com/news/peningkatan-kapasitas-asn-babak-baru-pengelolaan-papua>